

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006



Diterbitkan : Februari 2007



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**

Jl. Basuki Rachmat no. 10 Telp./Fax. (0721) 486761



ABSTRAK

Provinsi Lampung terletak antara 103°40' - 105°50' Bujur Timur, dan 3°45' - 6°45' Lintang Selatan, dengan ibukota Bandar Lampung. Batas-batas wilayah adalah sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah timur dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, dan 2 (dua) kota, yaitu Bandar Lampung dan Metro.

Luas wilayah daratan Provinsi Lampung sebesar 35.376,50 km² dan 69 buah pulau dengan kondisi topografi yang beragam, dan panjang garis pantai 1.105 km (termasuk pulau kecil) serta luas wilayah perairan 16.623,30 km². Sebelah selatan dan barat merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan daerah bagian tengah dan timur relatif datar, serta sebagian merupakan rawa dan sebagian lagi merupakan habitat mangrove. Di wilayah Provinsi Lampung terdapat beberapa sungai besar, antara lain Way Sekampung, Way Seputih, Way Pengubuan, Way Tulang Bawang, Way Terusan, Way Pegadungan dan Way Semangka. Sebagian besar sungai-sungai tersebut mengalir ke arah Timur wilayah Lampung, dengan hulu sungai sebagian besar berada di wilayah barat (Lampung Barat dan Tanggamus).

Dalam rangka memanfaatkan sumberdaya alam dan mendukung kelestarian lingkungan, upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan tanggungjawab sosial melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, penataan kelembagaan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan. Dalam kerangka tersebut Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan yang mengacu pada perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

Mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kondisi, potensi, kendala dan peluang yang dimiliki, maka arah kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah di Provinsi Lampung adalah *"Terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis, serta menjadi provinsi unggulan dan berdayasaing di Indonesia."*

Arah Kebijakan Umum (AKU) pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 adalah:

1. Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan, dengan mewujudkan unit pengelolaan hutan produksi lestari berbasis masyarakat dan didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif.
2. Mengembangkan pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lebih efisien, optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar berbagai pemanfaatan, sehingga berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat (*community development*) di wilayah sekitar pertambangan migas.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral, batubara, gas bumi, air tanah, melalui pembinaan usaha pertambangan yang berprinsip *good mining practice*.
5. Melindungi sumberdaya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan, konservasi untuk menjamin kualitas eksistensi agar tetap terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan.
6. Merehabilitasi sumberdaya alam yang rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam tersebut, agar berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
7. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transportasi, partisipasi, dan akuntabilitas.
8. Mengendalikan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, baik di darat, perairan tawar, dasar laut, maupun udara, sehingga masyarakat dapat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
9. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Untuk dapat meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu disusun program-program yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Perlu dibuat peta zona kerawanan gempabumi dengan skala rinci khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung pada umumnya sebagai data dasar dalam menyusun Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bangunan strategis, vital, pemukiman dan mengundang banyak konsentrasi orang agar dibangun dengan konstruksi tahan gempabumi. Hindari membangun pada tanah timbunan dan lereng yang terjal, serta di sepanjang zona sesar aktif yang berfungsi sebagai sumber gempabumi di darat, meskipun magnitudonya tidak terlalu besar.
2. Program pemulihan kualitas lingkungan, untuk mengevaluasi kegiatan dan penurunan beban lingkungan serta meningkatkan daya dukung lingkungan. Dan perlunya memperbaiki, menjaga dan mengembangkan fungsi konservasi kawasan bukit, pesisir/pantai, perairan laut dan pulau.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam program pengelolaan sampah/limbah domestik, sebagai upaya menciptakan terwujudnya kota-kota yang bersih, indah dan aman. Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru sudah saatnya dikembangkan. Biogas memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi dengan murah dan tidak mencemari lingkungan.
4. Teknologi teknologi produksi biogas dari air limbah industri tapioka merupakan alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing industri tapioka melalui penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Konsep ini perlu segera diwujudkan mengingat cadangan bahan bakar minyak semakin menipis dan pemanasan global sudah menjadi isu semua negara. Teknologi ini juga dapat diterapkan untuk pengolahan air limbah dari agroindustri lain seperti industri kelapa sawit, ethanol, pengalengan nenas, dan peternakan sapi. Dengan menerapkan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dunia usaha yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dan daya saing Provinsi Lampung.
5. Pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL, dilakukan melalui pengendalian pembangunan diantaranya industri, rumah sakit, rumah makan, dan hotel yang diarahkan pada pengembangan industri bersih, yaitu industri yang hemat lahan dan air, non polusi serta menyerap banyak tenaga kerja serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
6. Melakukan pendidikan lingkungan terhadap masyarakat secara terus menerus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuannya sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini dapat dimulai dari anak-anak usia TK, SD, SMP, dan SMA.
7. Mengembangkan penerapan konsep produksi bersih dan nir limbah (*cleaner production dan zero emission*) di berbagai industri.

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan hal penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, namun pembangunan tidak akan berkelanjutan bila dilakukan tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan tersebut. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan adanya suatu upaya serius dan konsisten dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan yang meliputi upaya pemanfaatan sumber daya alam yang menyertakan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam melakukan klasifikasi Basis Data Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2006, kami berpedoman kepada Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Basis Data Lingkungan Hidup Daerah merupakan data dasar bagi keperluan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan data tersebut digunakan untuk melakukan analisis lingkungan hidup dengan *Metode Pressure-State- Response (P-S-R)* yang disajikan dalam bentuk Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik moral maupun materil dalam Penyusunan Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung ini. Selanjutnya kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan sebagai dokumen untuk ditindaklanjuti, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini.

Kepala BAPEDALDA Provinsi Lampung,

SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 460013827

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum Wilayah	1
1.2. Pembangunan Berkelanjutan	6
1.3. Isu-Isu Lingkungan Hidup.....	7
a. Banjir dan Tanah Longsor	8
b. Gempa Bumi dan Tsunami	9
c. Kasus Flu Burung di Provinsi Lampung	12
d. Kebakaran Hutan dan Lahan	13
e. Rusaknya ekosistem di kawasan pantai Teluk Lampung.....	14
f. Degradasi Lahan.....	15
g. Potensi Pencemaran Udara	16
h. Limbah industri dan Rumah Sakit	17
i. Penggerusan Bukit.....	18
1.4. Maksud Dan Tujuan	19
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN.....	20
2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah	20
2.1.1. Visi Pembangunan Provinsi Lampung	21
2.1.2. Misi Pembangunan Provinsi Lampung.....	21
2.1.3. Strategi Pembangunan Daerah.....	22
2.2. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	24
2.3. Kebijakan Tata Ruang.....	28
2.4. Kebijakan Sosial Ekonomi Dan Budaya	37
BAB III ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN.....	44
3.1. Konsep Dasar Analisis dan Evaluasi.....	44
3.2. Sumberdaya Alam	46
3.2.1. Sumberdaya Lahan	46
3.2.2. Sumberdaya Hutan	47
3.2.3. Sumberdaya Air	54
3.2.4. Sumberdaya Mineral	57
3.2.5. Sumberdaya Udara	59
3.2.6. Rawa (Lahan Basah).....	62
3.2.7. Sumberdaya Pesisir dan Lautan	66
3.2.8. Keanekaragaman Hayati.....	75

3.3. Sumberdaya Buatan.....	80
3.3.1. Perekonomian Daerah Lampung	80
3.3.2. Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	82
3.3.3. Pencemaran Udara	87
3.3.4. Pencemaran Air	91
3.3.5. Limbah Padat.....	93
3.4. Sumberdaya Manusia.....	96
3.4.1. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk	96
3.4.2. Angkatan Kerja.....	98
3.4.3. Migrasi.....	100
3.4.4. Struktur Umur Penduduk.....	100
3.4.5. Pendidikan.....	101
3.4.6. Kesejahteraan Masyarakat.....	103
BAB IV REKOMENDASI.....	105
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Wilayah

Provinsi Lampung terletak pada posisi 103°30' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 3°45' sampai dengan 6°45' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah daratan sebesar 3.528.835 Ha (BPS Provinsi Lampung, 2006) termasuk pulau-pulau kecil, Provinsi Lampung merupakan jalur perhubungan antara Pulau Sumatera dan Jawa, yang berbatasan dengan:

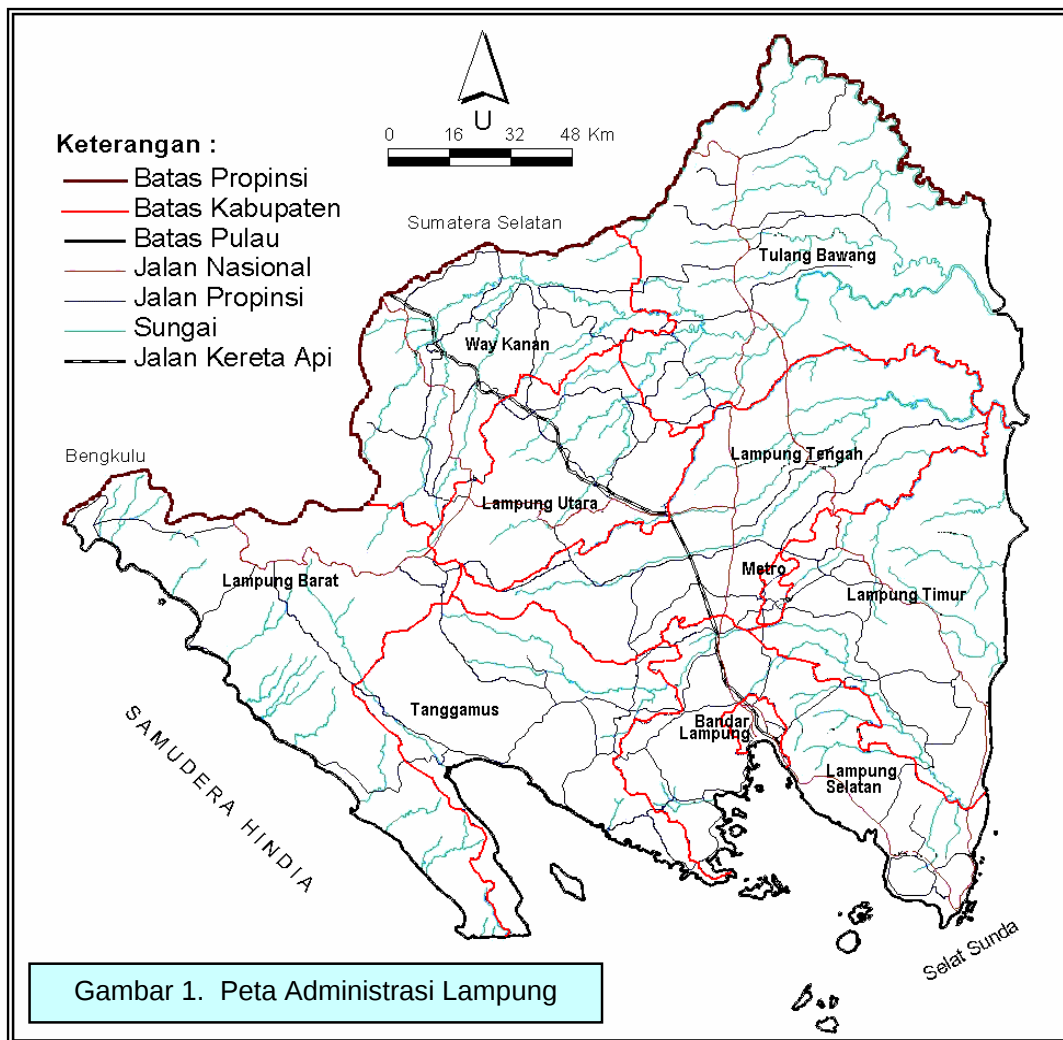
Sebelah Utara	:	Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan
Sebelah Timur	:	Laut Jawa
Sebelah Selatan	:	Selat Sunda
Sebelah Barat	:	Samudera Hindia

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang No.14 Tahun 1964 tanggal 8 Maret 1964, yang terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Saat ini Provinsi Lampung telah berkembang menjadi 10 (sepuluh) wilayah kabupaten/kota, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro (Gambar 1).

Provinsi Lampung memiliki sumberdaya alam cukup banyak, antara lain 69 buah pulau kecil, topografi yang beragam, garis pantai 1.105 km (termasuk pulau kecil), serta wilayah perairan 16.623,30 km². Wilayah bagian selatan dan barat merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur pegunungan Bukit Barisan

Pendahuluan

dan merupakan bagian hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Lampung. Wilayah bagian tengah dan timur relatif datar, dan sebagian merupakan rawa-rawa dan sebagian lagi merupakan habitat mangrove. Beberapa sungai besar yang ada, antara lain Way Sekampung, Way Seputih, Way Pengubuan, Way Tulang Bawang, Way terusan, Way pegadungan dan Way Semangka. Sebagian besar sungai-sungai tersebut mengalir ke arah timur, dengan hulu sungai sebagian besar berada di wilayah barat (Lampung Barat dan Tanggamus).



Jenis-jenis tanah utama di Provinsi Lampung menurut klasifikasi USDA (Soil Taxonomy) adalah meliputi order tanah Ultisols, Inceptisols, Alfisols, Entisols, Oxisols,

Pendahuluan

Andisols, dan Histosols. Dari jenis tanah tersebut yang terluas penyebarannya adalah Ultisols, Inceptisols, Alfisols, Oxisols, dan Entisols. Tekstur tanah pada lapisan atas (*top soil*) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis tekstur tanah serta penyebarannya, yaitu halus (15%), sedang (64%), dan Kasar (20%).

Berdasarkan pembagian iklim Smith dan Ferguson, Lampung termasuk dalam kategori iklim B, dengan ciri bulan basah selama 6 bulan yaitu Bulan Desember - Juni dan temperatur rata-rata 26^o C - 28^o C, dan rata-rata kelembaban udara disekitar 75% - 95%. Sebagian besar wilayah Provinsi Lampung mempunyai curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2000 - 3000 mm, wilayah dengan curah hujan sebesar (>3000 mm) berada pada pegunungan Bukit Barisan dan sebagian kecil di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan curah hujan kurang dari 2000 mm terjadi di daerah Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan.

Bentang alam Provinsi Lampung bervariasi dari datar sampai bergunung berada pada ketinggian 0 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan, topografi daerah ini berelief bergelombang sampai datar. Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu: berbukit sampai bergunung, berombak sampai bergelombang, dataran alluvial, dataran rawa pasang surut, dan river basin.

Litologi Provinsi Lampung didominasi oleh lapisan berumur Quarter terdiri dari Alluvium, Tufa Lampung, Endapan Gunungapi, Andesit Tua, Basalt Sukadana, Batupasir Neogen dan Formasi Palembang. Lapisan batuan Quarter tersebut menutup diatas *basement* berupa kelompok batuan metamorfik tersier yaitu sekis metamorf dan Granit kapur. Pola struktur geologi sangat dipengaruhi oleh Sistem Sesar (patahan) besar Sumatera yang memanjang mulai dari Teluk Lampung sampai ujung utara Pulau Sumatera sehingga pola patahan yang terbentuk pada daerah ini searah dengan patahan besar Sumatera yaitu berarah barat laut – tenggara.

Vegetasi alam mengikuti sebaran hutan yang terdiri atas: hutan mangrove tersebar di pantai timur; hutan gambut tersebar secara berkelompok di daerah Rawa Sragi, Muara sekampung, Way Kambas, Way Terusan, Pidada, dan Sungai Buaya; hutan hujan

Pendahuluan

bawah, menyebar hampir merata pada ketinggian di bawah 1.000 m; dan hutan hujan tengah menyebar sepanjang Bukit Barisan, dengan ketinggian antara 1.000 –1.800 m.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung sangat pesat, terutama pada periode 1971-1980 mencapai 5,77%, tergolong tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan tinggi tersebut utamanya disebabkan antara lain karena migrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Provinsi Lampung sebagai daerah penerima transmigran. Sampai dengan tahun 2005, jumlah penduduk telah mencapai 6.983.699 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,02%. Kepadatan absolut penduduk kabupaten/kota berkisar antara 79,49 sampai 4.163,90 jiwa/km², dengan rata-rata Provinsi 197,90 jiwa/km².

Infrastruktur di Provinsi Lampung telah cukup lengkap dan tersebar ke berbagai pelosok. Meskipun demikian, dalam beberapa hal infrastruktur belum mencukupi dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, utamanya pada wilayah-wilayah yang relatif terpencil. Di sisi lain, infrastruktur dan fasilitas umum yang telah tersedia memerlukan biaya pemeliharaan yang besar, sehingga pada kondisi keuangan pemerintah saat ini yang terbatas, banyak dijumpai berbagai kerusakan infrastruktur terutama jalan.

Pada tahun 2004 perekonomian Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen. Indikator pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan pada kondisi perekonomian Lampung secara keseluruhan. Pemulihan perekonomian Lampung ditunjang oleh kenyataan bahwa hampir semua sektor telah mengalami pertumbuhan positif. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang sangat berarti seperti sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (25,98 persen), sektor Listrik dan Air Bersih (7,60 persen), dan sektor Angkutan dan Komunikasi (6,73 persen).

Pada tahun 2005 perekonomian Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Indikator pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan pada kondisi perekonomian Lampung secara keseluruhan. Pemulihan perekonomian Lampung ditunjang oleh kenyataan bahwa hampir semua sektor telah mengalami pertumbuhan positif. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang

Pendahuluan

sangat berarti seperti sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5,97 persen), Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,66 persen) dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (5,26 persen)

Perekonomian Lampung didominasi oleh 4 (empat) sektor kegiatan ekonomi, yakni sektor Pertanian, sektor Perdagangan/Hotel/Restoran, sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa-jasa. Hal ini terlihat dari kontribusi masing-masing sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung. Jika dilihat dari kondisi setahun terakhir, maka pada tahun 2005 kontribusinya adalah 36,99 persen; 14,64 persen; 12,93 persen; dan 11,29 persen.

Apabila PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka akan diperoleh PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai PDRB per penduduk, sedangkan PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan 2000 dapat menunjukkan besarnya PDRB riil Per Kapita penduduk. Selama kurun waktu 2002 - 2005 PDRB Per Kapita Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2002 PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku sebesar 4,270 juta rupiah, naik menjadi 5,716 juta rupiah pada tahun 2005.

Dikaitkan dengan jumlah penduduk, ternyata pertumbuhan PDRB masih dapat melampaui laju pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita penduduk Provinsi Lampung mengalami kenaikan dari Rp 4,495 juta pada tahun 2003, menjadi Rp 5,234 juta pada tahun 2004. Walaupun PDRB per kapita tidak sepenuhnya dapat menggambarkan pendapatan per kapita penduduk, namun dapat dijadikan indikator yang cukup layak untuk menilai apakah pembangunan ekonomi suatu wilayah telah mampu memberikan tingkat capaian kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada. Berdasarkan data PDRB per kapita harga konstan tahun 1993, dapat dinyatakan bahwa walaupun relatif kecil, telah terjadi kenaikan riil pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung.

Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan pendapatan per orang penduduk, namun indikator ekonomi ini antara lain dapat

digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Dengan keterbatasannya indikator PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

1.2. Pembangunan Berkelanjutan

Konsepsi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan azas pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari telah diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam visi dan misi Provinsi Lampung. Salah satu penegasan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung adalah berupa salah satu misi ke-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung tahun 2004-2009 yaitu *Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana yang bersinergi dengan kabupaten/kota menuju pembangunan yang berkelanjutan.*

Kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan secara lebih terinci dicakup dalam tiga ranah yaitu kebijakan pembangunan lingkungan hidup, kebijakan tata ruang, dan kebijakan sosial ekonomi dan budaya. Arah Kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah Provinsi Lampung adalah mengelola dan memelihara sumberdaya alam daratan, perairan, dan kelautan sesuai dengan daya dukungnya untuk kemanfaatan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat antar generasi, serta memulihkan/merehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak dengan lebih banyak melibatkan peran aktif masyarakat.

Upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mencapai-nya adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam ruang yang tertata secara baik. Untuk kebutuhan tersebut, penyiapan rencana tata ruang wilayah diharapkan dapat mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan di wilayah Provinsi Lampung secara terpadu dan serasi.

Pendahuluan

Perkembangan pembangunan yang digerakkan oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat, sebagian dilakukan dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi sebagai terobosan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta persiapan meng-hadapi era globalisasi. Perkembangan lainnya diformulasikan sebagai kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada wilayah perdesaan dan pertanian melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan pembangunan sosial ekonomi budaya adalah dengan meningkatkan kesatuan masyarakat di Provinsi Lampung yang berciri multi etnis dalam suatu keserasian yang harmonis. Salah satu bentuk operasionalisasi kebijakan pembangunan adalah reorientasi pembangunan ekonomi kerakyatan dengan sektor pertanian sebagai unggulan yang tidak terlalu tergantung dari bahan baku impor, dengan tetap berorientasi pada pasar domestik dan internasional. Pembangunan ekonomi skala besar yang sudah ada diarahkan sebesar mungkin kepada pola kemitraan yang sinergik, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan mengembangkan kepedulian yang tinggi dari pengusaha besar untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil dan pengusaha menengah serta koperasi.

Strategi pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan pertanian konvensional menjadi industri pertanian dari hulu hingga hilir yang saling terkait dengan pendekatan agrobisnis kerakyatan yang berwawasan lingkungan. Penekanan skala prioritas pada pembangunan pertanian rakyat yang secara tradisional telah berkembang, berorientasi ekspor, dan terkait dengan agroindustri kerakyatan.

1.3. Isu-Isu Lingkungan Hidup

Secara geografis Provinsi Lampung berdekatan dengan Pulau Jawa dan Jakarta, yang merupakan wilayah konsentrasi perekonomian nasional. Kondisi ini menyebabkan Provinsi Lampung menjadi koridor bagi distribusi barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, Provinsi Lampung menjadi sangat menarik bagi investasi setelah Pulau Jawa.

Adapun isu lingkungan hidup dan tata ruang yang berkembang di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Banjir dan Tanah Longsor

Berdasarkan perkembangan dinamika peredaran atmosfer dan suhu muka laut di wilayah Indonesia hingga akhir Nopember 2006, maka prakiraan sifat hujan Januari 2007 dan Februari 2007 di wilayah Indonesia pada umumnya mengalami peningkatan. Untuk Provinsi Lampung, perlu mewaspadaai terjadinya Banjir dan Tanah Longsor.

Pengertian banjir, *pertama*, aliran air sungai/drainase yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai/drainase yang menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah didaerah sekitar. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air, *kedua*, gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air dimuara akibat badai.

Ciri-ciri Daerah Berpotensi Bencana Banjir :

- 1). Daerah rendah yang tidak mempunyai sistem pembuangan air yang cukup.
- 2). Daerah rendah dilereng gunung yang tandus.
- 3). Pemukiman dipinggiran sungai.
- 4). Curah hujan yang tinggi.

Pengertian tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng

Pendahuluan

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.

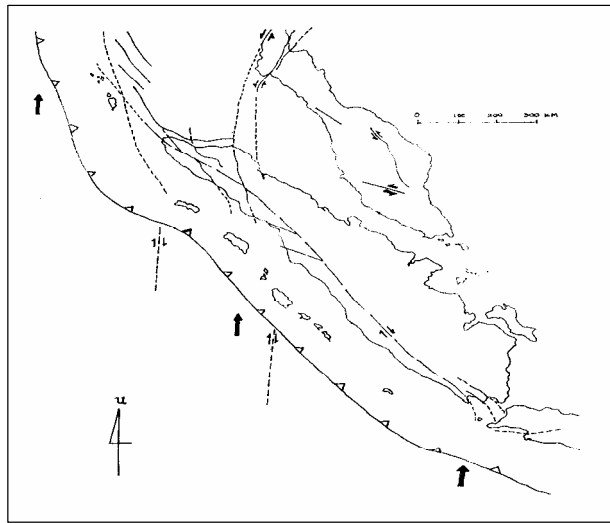
Faktor-faktor Penyebab Tanah Longsor

1. Hujan
2. Lereng terjal
3. Tanah yang kurang padat dan tebal
4. Batuan yang kurang kuat
5. Jenis tata lahan
6. Getaran
7. Susut muka air danau atau bendungan
8. Adanya beban tambahan
9. Pengikisan/erosi
10. Adanya material timbunan pada tebing
11. Bekas longsoran lama
12. Adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung)
13. Penggundulan hutan
14. Daerah pembuangan sampah

b. Gempa Bumi dan Tsunami

Ditinjau dari kondisi wilayah Provinsi Lampung baik faktor geografi dan demografi sangat berpotensi terhadap rawan bencana gempa bumi, hal tersebut dapat dipengaruhi dengan berbagai hal yang timbul antara lain dengan topografi yang terdapat disepanjang Bukit Barisan dimana terdapat sesar atau patahan lempengan bumi yang merupakan bagian dari Tektonik Sumatera.

Gambar 2. Peta Sesar Sumatera



Tektonik Sumatera dipengaruhi oleh Lempeng Samudera Indonesia Australia dan Lempeng Eurasia, dimana Lempeng Samudera Indonesia Australia mendorong ke arah utara dan menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Tempat pertemuan ke dua lempeng ini kurang lebih 200 km sebelah barat Sumatera disebut juga Java Trench, yang merupakan bagian dari jalur gempa Mediterania. Akibat dorongan dan penyusupan tersebut maka di Sumatera terbentuk Bukit Barisan dan Semangko Fault, atau disebut juga Sumatera Fault System (SFS) yang merupakan sumber gempa merusak terbesar di kawasan Sumatera.

Kerangka Tektonik Lampung merupakan sub sistem dari kerangka tektonik Pulau Sumatera dimana ada beberapa segmen Sumatera Fault yang sangat berpengaruh yaitu Segmen Ranau, Segmen Semangko dan aktifitas busur Sunda dan berbagai patahan-patahan kecil yang tersebar di Selat Sunda Lampung Selatan serta adanya gunung Krakatau yang menyebabkan tingginya Seismisitas di kawasan Lampung Bagian Barat dan Lampung Bagian Selatan, termasuk Kota Bandar Lampung. Untuk Kawasan Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan Bandar Lampung, bencana yang dapat terjadi tidak hanya gempa bumi akan tetapi juga rawan tsunami, banjir, longsor dan kebakaran.

Pendahuluan

Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kota Bumi mencatat getaran Gempa bumi Tektonik yang terjadi diawal tahun 2006 hingga saat ini sebagai berikut :

GEMPA BUMI TEKTONIK BERDASARKAN INTENSITAS MAXIMAL

No.	Tanggal	Waktu	Kota Intensitas Max
1	28/01/2006	08:53:08.00	Kotabumi (Lampung)
2	08/04/2006	16:56:55.0	Krui dan Liwa
3	06/05/2006	17:16:51	Krui
4	12/05/2006	15:16:58.0	Bandarlampung
5	12/06/2006	06:43:43.0	Tanjungkarang
6	16/06/2006	09:49:47.0	Tanjungkarang
7	23/06/2006	00:47:36.7	Bandarlampung
8	24/06/2006	15:43:52	Pringsewu
9	14/08/2006	01:19:26	Tanjungkarang
10	22/08/2006	14:08:1.4	Tanjungkarang
11	22/08/2006	18:57:28.9	Tanjungkarang

Data diatas menunjukkan masih banyaknya lempengan atau patahan bumi yang masih aktif. Hal ini akan memacu sesar-sesar yang tidak aktif dapat menjadi aktif sehingga menimbulkan daerah yang diperkirakan tidak terjadi getaran permukaan bumi (gempa) akan dapat terjadi sehingga perlu adanya kewaspadaan dari seluruh unsur Satkorlak dan masyarakat baik yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan Tsunami.

Berbeda dengan gempa bumi tektonik yang hingga kini belum dapat diprediksi waktu kejadiannya, Tsunami dapat diperkirakan kedatangannya beberapa saat sebelum dengan melihat gejala alam di daerah pantai. Prediksi Tsunami dapat dilakukan melihat tanda-tanda alam antara lain :

1. Kejadian mendadak dan pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan surutnya air laut.
2. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

3. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber Tsunami dan waktu tiba Tsunami di pantai mengingat kecepatan gelombang gempa jauh lebih besar dibandingkan kecepatan Tsunami.
4. Di Indonesia pada umumnya Tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah terjadinya gempa bumi besar di bawah laut.

Bila didasar laut topografi berupa lereng, maka sebelum Tsunami sampai ke pantai akan terdengar bunyi ledakan dan bila strukturnya landai suara gelombang yang muncul seperti gendering, selain itu bau garam yang terbawa angin dan udara dingin menjadi pertanda datangnya Tsunami. Gelombang tsunami biasanya datang dua hingga tiga kali yang mana gelombang pertama relatif kecil, namun 10 menit hingga 15 menit kemudian akan datang gelombang yang lebih besar.

c. Kasus Flu Burung di Provinsi Lampung

Kasus Flu burung (Avian Influenza) di Provinsi Lampung pertama kali bulan terjadi September 2003 di Kabupaten Tulang Bawang. Menyebar di Kabupaten/Kota dengan kematian unggas 977.718 ekor. Tahun 2004 di 9 Kabupaten/Kota (Kabupaten Way Kanan tidak ada kasus) dengan kematian 1.835.218 ekor unggas. Tahun 2005 di 4 Kabupaten/Kota (Tanggamus, Tulang Bawang, Bandar Lampung dan Lampung Barat) dengan kematian 4.355 ekor unggas. Tahun 2006 (s/d Februari 2006) di 2 Kabupaten/Kota (Bandar Lampung dan Lampung Selatan) dengan kematian 840 ekor unggas (Ayam buras dan burung puyuh).

Dari pengamatan lapang ditengarai beberapa masalah antara lain :

1. Sistem pemeliharaan ternak pada sektor empat (peternakan ayam buras secara sambilan) masih sangat tradisional seperti : tidak semua memiliki kandang, pada siang hari ternak berkeliaran, tidak dilakukan penyemprotan, ternak sakit dijual karena faktor ekonomi.

Pendahuluan

2. Pada sektor ini pelaksanaan biosekuriti tidak dilakukan oleh peternak sehingga merupakan sumber penularan penyakit, demikian pula vaksinasi sulit dilakukan dalam prosentase yang mampu melindungi populasi.
3. Faktor penular yang berasal dari burung liar dimungkinkan sebagai sumber penularan yang sulit diketahui.
4. Otoritas kesehatan hewan (veteriner) di Kabupaten/Kota banyak yang berada dalam organisasi gabungan sehingga prosedur operasional kurang efektif.
5. Tenaga penyuluh sudah sangat berkurang karena penyuluh yang ada sudah lanjut usia/pensiun, dan banyak beralih pada jabatan struktural. Disamping tidak tersedianya biaya yang memadai untuk operasional penyuluhan
6. SDM Dokter Hewan (medik veteriner) dan tenaga teknis menengah (paramedik veteriner dirasakan masih sangat kurang.
7. Fasilitas kendaraan roda dua dan fasilitas kesehatan hewan yang kurang memadai.
8. Tidak tersedianya biaya ganti rugi untuk depopulasi.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.

Faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, antara lain :

- 1) Aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan hutan dan atau lahan, sehingga menyebabkan bencana kebakaran.
- 2) Faktor alam

- 3) Angin yang cukup besar dapat memicu dan mempercepat menjalarnya api
- 4) Topografi yang terjal semakin mempercepat merembetnya api dari bawah ke atas

e. Rusaknya ekosistem di kawasan pantai Teluk Lampung

Kawasan permukiman yang terletak di pesisir atau tepi pantai dimana pada umumnya merupakan bangunan ilegal, karena bardirinya bangunan berada diatas lahan milik negara/lainnya yang ditempati karena kedekatan dengan sumber mata pencaharian yakni nelayan. Karakteristik kawasan ini sebagian besar rumahnya berbentuk panggung, sering banjir/tergenang, tata letak bangunan yang kurang teratur, serta lingkungan dan sanitasi yang kurang sehat.

Pencemaran laut sudah sering terjadi di Teluk Lampung. Sumber pencemar di Teluk Lampung dapat berasal dari berbagai aktivitas di pelabuhan Panjang, limbah kapal nelayan, limbah domestik, perhotelan, pasar, serta limbah cair dan padat berbagai industri di Bandar Lampung. Limbah domestik



Gambar 3. Reklamasi Pantai Kota Bandar Lampung

umumnya berupa limbah padat, seperti plastik, kardus, kertas, potongan kayu, dan limbah organik lainnya. Limbah domestik ini masuk ke Teluk Lampung melalui sungai terutama pada musim hujan, yaitu Way Galih, Way Ambon, Way Pidada, Way Lunik, Way Kuala, Way Kunyit, Way Kupang, dan Way Belau. Limbah padat yang terbawa sungai-sungai tersebut setelah masuk ke Teluk Lampung, sebagian menjadi tumpukan sampah di sepanjang pantai. Hal ini dapat dilihat sepanjang pantai mulai dari Kelurahan Way Lunik sampai Kotakarang, Telukbetung.

Merupakan suatu fakta, pembangunan gedung, industri di wilayah pesisir Teluk Lampung (di daerah Sukaraja dan Kota karang) sudah tidak mentaati garis sempadan pantai yang diawali dengan melakukan penimbunan pantai dengan tanah yang diambil dari bukit atau gunung yang ada di daerah Kota Bandarlampung yang

Pendahuluan

dilaksanakan atas izin atau kebijaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang sudah dimulai dilakukan sejak tahun 1980. Padahal diketahui bahwa kesinambungan perkembangan dan kelestarian kawasan pantai sangat penting untuk menghindari terjadinya bencana alam seperti badai/tsunami lebih-lebih Lampung merupakan daerah patahan bumi seharusnya batas garis sempadan pantai ditaati. Bila mengikuti standar internasional sejauh 2 mil/3,4 km dari garis pantai terluar atau titik surut terjauh hingga kearah daratan atau standar nasional adalah 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat, dan di daerah areal tersebut tidak boleh dilakukan kegiatan pembangunan struktur bangunan gedung.

Penimbunan wilayah pesisir selain memiliki dampak terhadap pencemaran laut dan merusak biota laut serta terumbu karang terutama karena sedimentasi, tentunya berdampak bagi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya kepada laut.

f. Degradasi Lahan

Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan tingginya kebutuhan penduduk terhadap sumberdaya lahan untuk areal pemukiman, budidaya pertanian, dan penggunaan lain. Kondisi ini menyebabkan penggunaan lahan menunjukkan gejala pergeseran, terutama disebabkan oleh adanya *ekstensifikasi* dan *introduksi* akibat adanya penambahan aeral budidaya. Peningkatan kebutuhan lahan di daerah hulu



Gambar 4. Degradasi lahan Kota Bandarlampung

Pendahuluan

berimplikasi pada degradasi lingkungan berupa meningkatnya erosi dan lahan kritis. Menurut catatan terakhir, kerusakan hutan mencapai lebih dari 80% untuk Kawasan Hutan Lindung, lebih dari 67,5% untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan lebih dari 76% untuk Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan lahan di wilayah hilir dan pesisir untuk budidaya tambak dan sawah telah meningkatkan abrasi pantai. Percepatan abrasi pantai meningkat secara signifikan akibat dari pembukaan lahan tidak berwawasan lingkungan yang merusak hutan mangrove sebagai jalur hijau (*green belt*), seperti yang terjadi di Pantai Timur Lampung (utamanya di Kuala Penet dan Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai). Luas hutan mangrove di Pantai Timur hanya tinggal sekitar 2.000 ha, dari luas semula sekitar 20.000 ha.

Selain konversi lahan mangrove menjadi tambak, penyebab utama degradasi sumberdaya pesisir dan laut adalah penangkapan ikan menggunakan racun dan bahan peledak (*illegal fishing*), yang terjadi di Teluk Lampung, Teluk Semangka dan Pantai Barat. Tindakan seperti ini sangat merusak ekosistem terumbu karang dan mengancam kelestarian *stock* ikan.

Degradasi sumberdaya hutan telah terjadi dengan sangat nyata di Provinsi Lampung. Kerusakan kawasan hutan untuk semua jenis fungsi hutan (kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi) telah meningkat menjadi hampir 60%, akibat aktivitas pencurian kayu (*illegal logging*) dan perambahan hutan. Kerusakan kawasan hutan bahkan telah terjadi pada kawasan konservasi (Taman Nasional dan Taman Hutan Raya) dengan angka yang telah melampaui 40%.

g. Potensi Pencemaran Udara

Pencemaran lingkungan secara potensial dapat bersumber dari emisi gas dan debu pada industri pengolahan, dan limbah padat (sampah domestik). Walaupun emisi gas pada beberapa industri pengolahan masih berada di bawah ambang batas, namun peningkatan jumlah industri utamanya di sekitar kawasan perkotaan, menunjukkan potensi besar untuk menjadi sumber bahan pencemar. Di sisi lain, produksi limbah



Gambar 5. Emisi gas dari Industri

domestik (sampah) di Provinsi Lampung telah mendekati angka 8.000 m³/hari, merupakan sumber masalah lingkungan yang sangat potensial pada masa mendatang, utamanya di kawasan perkotaan yang sempit lahan.

h. Limbah industri dan Rumah Sakit

Limbah industri dapat didefinisikan sebagai suatu hasil buangan berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari proses industri pengolahan maupun non industri pengolahan.

Limbah dari industri pengolahan ini hanya sebagian kecil yang diproses melalui daur ulang menjadi bahan lain, selebihnya banyak dibuang langsung. Sedangkan sumber limbah padat dari industri non pengolahan yaitu limbah padat yang berasal dari berbagai sektor kegiatan antara lain limbah padat dari sektor domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta dari tempat-tempat umum.

Limbah padat dan sektor domestik ini banyak dipengaruhi oleh asal-usul sumber limbah padat yang ada terutama di daerah perkotaan berasal dari kegiatan domestik

Pendahuluan

(rumah tangga). Jumlah limbah padat non-industri yang diproduksi di Kota Bandar Lampung telah mendekati angka 1.000 m³/hari.



Gambar 6. Kondisi Sampah di TPA Bakung

Sedangkan Sampah atau limbah dari alat-alat pemeliharaan kesehatan merupakan suatu faktor penting dari sejumlah sampah yang dihasilkan, beberapa diantaranya mahal biaya penanganannya. Namun demikian tidak semua sampah medis berpotensi menular dan berbahaya. Sejumlah sampah yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas medis hampir serupa dengan sampah domestik atau sampah kota pada umumnya. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal yang paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan berbahaya dari sampah yang umum.

Sampah yang secara potensial menularkan penyakit memerlukan penanganan dan pembuangan, dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah, secara teknis tidak rumit dan rendah pencemarannya bila dibandingkan dengan insinerator.

Banyak jenis sampah yang secara kimia berbahaya, termasuk obat-obatan, yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Sampah-sampah tersebut tidak sesuai diinsinerasi. Beberapa, seperti merkuri, harus dihilangkan dengan cara merubah

Pendahuluan

pembelian bahan-bahan; bahan lainnya dapat didaur-ulang; selebihnya harus dikumpulkan dengan hati-hati dan dikembalikan ke pabriknya.

Sampah hasil proses industri biasanya tidak terlalu banyak variasinya seperti sampah domestik atau medis, tetapi kebanyakan merupakan sampah yang berbahaya secara kimia.

i. Penggerusan Bukit

Aktivitas pertambangan (terutama galian C) cukup potensial menjadi sumber degradasi lingkungan di Kota bandar Lampung, seperti penggalian batu dan pasir, yang menyebabkan hilangnya vegetasi dan peningkatan erosi tanah. Sebagian besar



Gambar 7. Penggundulan Bukit

penggalian batu-batu diambil dari gunung-gunung yang berada di Kota Bandar Lampung, antara lain gunung camang, gunung kunyit, gunung sulah, dan gunung perahu. Kegunaan galian batuan tersebut salah satunya adalah untuk reklamasi pantai teluk Lampung. Penggerusan gunung-gunung yang ada di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak terganggunya ekosistem fauna dan flora di sekitar gunung tersebut.

Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara substansi menggambarkan bahwa apabila semua pihak yang terkait

(*stakeholders*) dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka penurunan kualitas lingkungan hidup akan dapat di kurangi. Mengacu pada konsepsi tersebut maka rumusan rencana pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pokok-pokok kebijaksanaan yang strategis yang diwujudkan melalui pembangunan tahunan yang didasarkan pada rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fondasi yang handal berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), dan kepentingan penanaman modal (investor).

Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*good environmental governance*) di daerah; sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu perubahan dengan menciptakan atau membuat kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan adalah upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan pembangunan meliputi pendayagunaan sumberdaya sumberdaya buatan, manusia dan sumberdaya alam. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya harus mampu memobilisasi pengembangan potensi daerah guna mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah mengelola dan memelihara sesuai daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan disetiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya, melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang berpandangan jauh ke depan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, melalui penetapan tujuan yang jelas sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh masyarakat Lampung, dan dengan memperhatikan tantangan, kendala, peluang dan potensi yang dimiliki serta faktor lingkungan internal dan eksternal, yang selanjutnya diformulasikan dalam

bentuk dokumen perencanaan daerah berupa **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009**, yang memuat rencana lima tahunan dengan menggambarkan visi, misi, Program Kepala Daerah yang memuat Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah.

RPJM Provinsi Lampung ditetapkan dengan maksud memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Oleh sebab itu mengingat kewenangan dan dana terbatas, maka perencanaan pembangunan tersebut telah disusun secara antisipatif, realistis, dan dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkannya.

2.1.1. Visi Pembangunan Provinsi Lampung

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung telah dirumuskan Visi Provinsi Lampung dalam jangka menengah (2004 -2009) yaitu: *"Terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis, serta menjadi provinsi unggulan dan berdayasaing di Indonesia."*

2.1.2. Misi Pembangunan Provinsi Lampung

Misi 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berakhlak mulia, profesional, unggul dan berdayasaing.

Misi 2 : Membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah berbasis

agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing.

Misi 3 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global.

Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung mantapnya rasa kesatuan dan persatuan di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana yang bersinergi dengan kabupaten/kota menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 6 : Membangun demokrasi, menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta mendukung penegakan supremasi hukum.

Misi 7 : Mengembangkan budaya daerah dan masyarakat yang berkarakter positif dan kondusif bagi pembangunan.

Misi 8 : Meningkatkan kesinergian dan keterpaduan serta keharmonisan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.3. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah Provinsi Lampung 2004-2009 dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi-5 di bidang pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi Lampung 2004-2009 adalah sebagai berikut:

1. Mencari kesepakatan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah kab/kota dalam membagi kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam (hutan, laut, tambang);

2. Meningkatkan keterlibatan peran masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, memperkuat kelembagaannya dalam wilayah DAS, dan mengefektifkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum;
3. Mengintensifkan upaya perlindungan/pengamanan kawasan konservasi dan merehabilitasi kerusakannya secara terprogram dan berkelanjutan;
4. Menggerakkan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis dan upaya pemeliharannya secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. Mengelola dan memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya (ekoturisme) secara optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian sumberdaya alam berbasis masyarakat;
6. Mengolah dan mendayagunakan potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari berbasis masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk;
7. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak;
8. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dengan pihak swasta dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari/berkelanjutan;
9. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumberdaya mineral lainnya, dan meningkatkan eksploitasinya dengan selalu memperhatikan aspek berkelanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan (menerapkan *Good Mining Praticce*);
10. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil berbasis masyarakat, dengan tetap menengahkan prinsip-prinsip *Good Mining Praticce*;
11. Meningkatkan manfaat dan nilai tambah produk pertambangan;

12. Merehabilitasi kawasan bukan pertambangan;
13. Meningkatkan koordinasi dalam rangka harmonisasi/sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
14. Menegakkan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan (darat, perairan, laut, pesisir, pulau-pulau kecil);
15. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
16. Mengembangkan upaya mitigasi bencana alam/lingkungan melalui penyebaran informasi wilayah yang rentan/rawan bencana dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
17. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap isu lingkungan hidup dan berperan serta aktif sehingga kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

2.2. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian ini secara umum mencakup lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Arah Kebijakan Umum (AKU) pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 adalah:

1. Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan, dengan mewujudkan unit pengelolaan hutan produksi lestari berbasis masyarakat dan didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif.
2. Mengembangkan pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lebih efisien, optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar berbagai pemanfaatan, sehingga berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat (*community development*) di wilayah sekitar pertambangan migas.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral, batubara, gas bumi, air tanah, melalui pembinaan usaha pertambangan yang berprinsip *good mining practice*.
5. Melindungi sumberdaya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan, konservasi untuk menjamin kualitas eksistensi agar tetap terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan.
6. Merehabilitasi sumberdaya alam yang rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam tersebut, agar berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
7. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transportasi, partisipasi, dan akuntabilitas.
8. Mengendalikan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, baik di darat,

perairan tawar, dasar laut, maupun udara, sehingga masyarakat dapat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

9. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pencegahan, pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup akan terus dilakukan dengan menetapkan sasaran secara tepat dan memilih prioritas yang benar-benar dapat menjawab permasalahan yang ada. Hal ini harus dapat di tuangkan dalam program-program dan pembangunan lingkungan hidup yang memiliki kualitas dan terintegrasi. Sehingga program-program dimaksud dapat menyelamatkan sumberdaya alam yang ada dari kerusakan yang lebih parah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Masyarakat juga menuntut pelayanan dan penyelesaian yang cepat dan adil atas permasalahan yang timbul akibat pencemaran, gangguan dan kerusakan lingkungan hidup yang banyak dialami masyarakat di berbagai daerah.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menetapkan kewenangan Kabupaten/Kota semakin besar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut pasal 7 ayat I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pengelolaan Lintas Kabupaten dilaksanakan oleh Provinsi. Oleh karena itu peran Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 11 ayat 1 menjadi semakin strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup pada masa pelaksanaan Undang-undang Otonomi daerah tersebut.

Secara garis besar Otonomi Daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup berarti:

- (a) Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dengan ekosistem setempat,
- (b) Menghormati kearifan tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat di

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari,

- (c) Tidak berdasarkan batas administratif, tetapi berdasarkan batas ekologi (*bioecoregion*),
- (d) Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melewati daya dukung,
- (e) Pelibatan secara aktif masyarakat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Lampung, telah dibentuk institusi pengelolaan lingkungan hidup pada 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, antara lain :

- Bapedalda Kota Bandar Lampung.
- Bapedalda Kabupaten Lampung Utara.
- Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
- Bapedalda Kabupaten Lampung Timur.
- Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kab. Tangamus.
- Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Way Kanan.
- Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Lampung Selatan.
- Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro.
- Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang.

2.3. Kebijakan Tata Ruang

Upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah, agar sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam matra ruang yang tertata secara baik. Untuk kebutuhan tersebut, penyiapan rencana tata ruang wilayah diharapkan dapat mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan di wilayah Provinsi Lampung secara terpadu dan serasi.

Persoalan lingkungan hidup merupakan agenda penting bagi Provinsi Lampung yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan wilayah. Kerusakan dan okupasi hutan oleh pemukiman dan kegiatan budidaya merupakan masukan dalam penetapan kebijaksanaan penataan ruang. Pemandu serasian TGHK dengan RSTRP Lampung ternyata perlu dilengkapi oleh kondisi obyektif pemanfaatan kawasan hutan untuk permukiman dan kegiatan budidaya, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan redesain status kawasan hutan, terutama kawasan hutan yang dapat dikonversi dengan mengusulkan persetujuannya kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Perkembangan tersebut perlu diposisikan sebagai konsideran dalam penataan ruang wilayah Provinsi Lampung.

Tantangan pembangunan sektor lingkungan hidup dan penerapan tata ruang adalah terbatasnya ruang di satu sisi dan jumlah penduduk yang terus bertambah di sisi lain. Selain itu pembangunan dan pertambahan penduduk yang pesat dan disertai dengan perkembangan yang dinamis juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan karakteristik lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung 2000-2015 disusun berlandaskan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah. RTRWP Lampung merupakan perwujudan rencana spasial pengembangan Daerah Provinsi Lampung 15 tahun ke depan pada skala 1 : 250.000. RTRWP Lampung merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional kedalam strategi dan struktur wilayah Daerah Provinsi Lampung. Secara fungsional RTRWP Lampung merupakan suatu kebijakan pokok pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang diwujudkan ke dalam bentuk rencana struktur yang menunjukkan antara lain:

- a) Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Provinsi Lampung;
- b) Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Provinsi Lampung dengan sekitarnya, khususnya wilayah Sumatera bagian Selatan, serta keserasian antar sektor;
- c) Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau masyarakat;
- d) Pengarahan (*guidance*) bagi pengembangan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung, maka arahan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi Lampung yang mendasari RTRWP Lampung 2000-2005 diorientasikan untuk melaksanakan tiga misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk Lampung.
2. Memperkuat dan membangun seluruh bagian wilayah Provinsi sesuai dengan potensinya.
3. Membangun lingkungan yang lestari secara berkelanjutan.

Strategi Pembangunan tata ruang dilakukan melalui :

- (a) Pengendalian secara konsisten kegiatan budidaya yang dapat memutus atau mengganggu fungsi ekosistem suatu ekosistem. Untuk menjalankan strategi tersebut, proses kesepakatan mengenai delineasi kawasan lindung yang lebih realistis menjadi amat penting dan perlu diikuti oleh implementasi pemanfaatan

ruang dan pengendaliannya secara taat asas. Proses pemadu-serasian TGHK dan evaluasi hak atas tanah menjadi tahap awal proses perencanaan tata ruang untuk menyiapkan alokasi ruang budidaya di Provinsi Lampung. Seluruh kriteria kawasan lindung perlu dikaji dalam konteks Provinsi Lampung, termasuk daerah aliran sungai, hutan lindung, pesisir, rawan gempa, maupun perlindungan setempat.

- (b) Memperkuat basis perekonomian menurut sektor-sektor unggulan pada masing-masing wilayah, termasuk memperluas keanekaragaman sumberdaya alam yang perlu dimanfaatkan, antara lain sumberdaya mineral, perikanan dan laut, dan sebagainya. Dalam strategi ini identifikasi sumberdaya alam, skala, dan nilainya menjadi penting untuk kekuatan dan perluasan aktifitas andalan bagi setiap bagian wilayah Provinsi Lampung.
- (c) Membentuk satuan ruang pengembangan yang lebih efisien dari segi aksesibilitas, kondisi fisik wilayah, ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peranan penduduknya. Satuan ruang pengembangan diharapkan menjadi lebih terbatas skalanya, namun jumlahnya menjadi lebih besar. Prinsip yang dianut adalah terciptanya skala ruang yang lebih terjangkau oleh suatu pusat dengan *hinterland-nya*, sehingga skala ekonomi suatu usaha dapat dicapai oleh sektor perekonomian rakyat di pedesaan.
- (d) Memperpendek hirarki fungsional dan tata-kaitan (*forward linkage*) antara sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan untuk mawadahi agroindustri dan agrobisnis dari setiap satuan ruang pengembangan. Melalui perkuatan siklus produksi dalam satuan ruang yang lebih terbatas diharapkan sektor primer tidak sekedar menghasilkan bahan mentah hasil ekstraksi, namun membentuk daur pertambahan nilai untuk dinikmati secara setempat serta melibatkan pelaku ekonomi lokal secara langsung. Dengan senantiasa memperkuat basis ekonomi lokal, maka sekaligus akan terbangun keterkaitan fungsional secara horizontal antara satuan ruang pengembangan.
- (e) Memperkuat *industrial-belt* yang telah terbentuk disekitar Bandar Lampung

dengan mengupayakan pengurangan ketergantungan terhadap pusat Jakarta.

Struktur ruang wilayah Provinsi Lampung terutama dibentuk oleh jaringan prasarana transportasi dan pusat pelayanan. Dua hal pokok yang menjadi pertimbangan utama bagi penetapan struktur ruang wilayah Provinsi Lampung adalah pengembangan struktur ruang yang lebih bersifat horizontal dibandingkan berhirarki, serta perkuatan struktur mikro pada satuan ruang yang lebih efisien melalui *pembangunan feeder-road* ke sentra penghasil sumberdaya primer.

Hirarki fungsional wilayah Provinsi Lampung yang bersifat horisontal diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan, yaitu :

- a. Pusat Pelayanan Primer, yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Lampung dan/atau wilayah sekitarnya (Sumbagsel). Pusat pelayanan ini terletak di Kota Bandar Lampung.
- b. Pusat Pelayanan Sekunder, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder A ini terdiri atas pusat pelayanan sekunder B. Pusat pelayanan sekunder A dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya, yang terletak di Kota Metro, Menggala, dan Kotabumi. Pusat pelayanan sekunder B terletak di Kalianda, Sukadana, Kota Agung, Punggur, Blambangan Umpu, dan Liwa
- c. Pusat Pelayanan Tersier, yaitu kota-kota mandiri selain pusat primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien.

Jaringan transportasi yang membentuk struktur ruang di Provinsi Lampung dibentuk melalui :

- a. Jalur regional berpola radial, meliputi 3 (tiga) jalur utama, yaitu jalur Timur mulai

dari Bakauheni, Ketapang, Bunut, Labuhan Maringgai, Sukadana, Bujung Tenuk, dan Pematang Panggang; jalur tengah yang merupakan bagian dari Trans Sumatera, mulai dari Bakauheni, Panjang, Bandar Lampung, Bandar Jaya, Kotabumi, Bukit Kemuning, Blambangan Umpu, sehingga kearah Palembang serta jalur Barat yang merupakan lanjutan dari jalur Tengah, mulai dari Bukit Kemuning, Sumber Jaya, Mutar Alam, Kenali, Liwa, Pugung, Tapak Melesom hingga ke Provinsi Bengkulu.

- b. Jalur sub-regional berpola laba-laba (*spider-net*), dengan pusatnya di Bandar Lampung yang akan memberikan akses yang tinggi terhadap perkembangan pusat pertumbuhan utama dengan wilayah lainnya. Pola jaringan laba-laba ini ditujukan untuk memelihara fungsi beberapa sarana transportasi penting seperti Pelabuhan Panjang dan Bandara Radin Inten II, serta melayani kebutuhan bagi aktifitas ekonomi berskala besar
- c. Jaringan jalan lokal yang merupakan *feeder-road* dengan fungsi koleksi dan distribusi komoditi ekonomi dari dan ke wilayah pedesaan. Komoditi yang difasilitasi oleh jaringan jalan ini adalah komoditi lokal yang berperan untuk menumbuhkan perekonomian berbasis sektor primer. Melalui pembangunan *feeder-road* ini, maka sektor perekonomian rakyat yang berskala ekonomi terbatas dapat terjangkau untuk diolah lebih lanjut dalam sektor skunder. *Feeder-road* ini selain diperankan oleh jalan-jalan lokal, juga oleh jalur sungai yang terutama banyak mengalir di kawasan Pantai Timur.

Sejalan dengan pembangunan jaringan transportasi yang membentuk struktur ruang wilayah Provinsi Lampung, prasarana transportasi dikembangkan untuk mendukung struktur ruang yang dibentuk.

Bersamaan dengan pembangunan *feeder-road*, pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan kecil didorong untuk melayani perdagangan antar bagian wilayah. Pelabuhan-pelabuhan yang dikembangkan untuk mendukung struktur ruang wilayah Provinsi Lampung meliputi pelabuhan Bakauheni, pelabuhan Panjang, pelabuhan Telukbetung, pelabuhan Mesuji, pelabuhan Bratasena, pelabuhan Labuhan Maringgai, pelabuhan

Kota Agung, dan Pelabuhan Krui.

Pemanfaatan jalur kereta api yang melayani pergerakan jarak sedang antar bagian wilayah Provinsi Lampung dengan bagian wilayah lainnya di region Sumatera bagian Selatan ditingkatkan utilitasnya. Secara ringkas rencana struktur ruang dan pusat-pusat pelayanan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2-2.

Pola pemanfaatan dan arah perkembangan ruang Provinsi Lampung merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Provinsi Lampung yang di dasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel:2-3. Struktur Pusat Pelayanan

Hirarki	Kota	Fungsi Utama	
Primer	Bandar Lampung	- Pusat Pemerintah Provinsi	
		- Pusat perdagangan dan jasa regional	
		- Pusat distribusi dan kolektor barang & jasa	
		- Pusat pendukung jasa pariwisata	
		- Pendidikan tinggi	
		- Industri	
Sekunder A	1. Metro	- Pemerintah kota	
	2. Kotabumi	- Perdagangan dan jasa	
		- Pemerintah kabupaten	
		- Perdagangan dan jasa	
	3. Menggala	- Industri	
		- Pemerintah kabupaten	
		- Perdagangan, jasa, dan distribusi	
	Sekunder B	1. Kalianda	- Kegiatan usaha dan produksi
			- Pusat Pemerintah kabupaten
- Jasa pendukung jasa pariwisata			
2. Kota Agung		- Perdagangan	
		- Pusat Pemerintah kabupaten	
		- Perikanan	
3. Sukadana		- Pusat Pemerintah kabupaten	
		- Perdagangan	
4. Punggur		- Pusat Pemerintah kabupaten	
		- Perdagangan	
5. Blambangan Umpu		- Pusat Pemerintah kabupaten	
		- Perdagangan	
	- Industri		
6. Liwa	- Pusat Pemerintah kabupaten		
	- Perdagangan dan jasa		
Tersier	1. Sidomulyo	- Pertanian	

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Hirarki	Kota	Fungsi Utama
		- Industri
	2. Tajung Bintang	- Industri
	3. Pringsewu	- Perdagangan
	4. Talang Padang	- Pengolahan hasil pertanian
	5. Labuhan Maringgai	- Perikanan
	6. Bandar Jaya	- Perdagangan dan Jasa
	7. Seputih Banyak	- Pengolahan hasil pertanian
	8. Mesuji Lampung	- Perikanan
		- Industri Perikanan
	9. Simpang Pematang	- Perdagangan
		- Industri pengolahan hasil pertanian

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung (2000)

Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Lampung yang lebih berimbang dan proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

Untuk menuju pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan adalah penetapan kawasan lindung, selanjutnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya yang secara umum terbagi 2 (dua) yaitu kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, industri, jasa dan perdagangan, serta kegiatan pelayanan lainnya.

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung secara garis besarnya akan mencakup 4 (empat) fungsi perlindungan sebagai berikut :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidro-orologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan sumberdaya air. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian Timur yang membentang dari Utara ke Selatan, Batu Serampok, Kubu Cukuh, Gunung Rajabasa, dan Gunung Balak.
2. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah suaka alam dan taman nasional Kepulauan Krakatau (Pulau Rakata, Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Sertung), kawasan Bukit Barisan bagian Barat yang membentang dari

Utara ke Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Raya di sekitar Gunung Betung, serta ekosistem mangrove dan rawa.

3. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi yang mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan banjir sekitar Wonosobo dan Padang Cermin; kawasan longsor di sekitar hutan lindung; kawasan rawan gempa di sekitar sesar/patahan Semangka, yaitu pada jalur Teluk Bakauheni dan sekitar Sumber Jaya, Rawa Sragi, dan Teluk Semangka.
4. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan perlindungan dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, estuaria, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat.

Arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Sampai tahun 2006 luas HPT adalah sebesar 33.358 ha terletak di bagian Barat Kabupaten Lampung Barat. Adapun luas dan luas HP sebesar 191.732 ha, tersebar di beberapa kabupaten, meliputi Seputih Surabaya, Gedong Aji, bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang, bagian Selatan Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Lampung Timur (meliputi Sekampung, Sukadana, Jabung), Lampung Selatan (Tanjung Bintang, Ketibung, Sidomulyo, Palas, Penengahan)

Kawasan budidaya pertanian terdiri atas 4 (empat) kawasan, yaitu :

1. Kawasan pertanian tanaman pangan,

Lokasi pertanian tanaman pangan lahan basah di Provinsi Lampung saat ini tersebar diseluruh daerah Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Tanggamus. Areal pertanian terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah (termasuk Kabupaten

Lampung Timur). Perkembangan lebih lanjut bagi kegiatan pertanian lahan basah diarahkan kesemua Kabupaten terutama Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang.

Luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering yang ada saat ini diupayakan untuk dipertahankan, terutama untuk mengembangkan pertanian rakyat. Pengembangan selanjutnya diarahkan pada lokasi-lokasi di seluruh Kabupaten, kecuali Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus.

2. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan,

Lokasi perkebunan yang telah ada tetap dipertahankan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan selanjutnya diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan.

3. Kawasan Budidaya Peternakan,

Lokasi peternakan diarahkan mengikuti lokasi pertanian pangan lahan kering. Peternakan dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang.

4. Kawasan Budidaya Perikanan,

Pemanfaatan lahan untuk perikanan darat tersebar diseluruh kabupaten, terutama di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang. Arahkan pola pemanfaatan bagi kawasan budidaya perikanan laut meliputi Pantai Timur Provinsi Lampung, Teluk Lampung, Teluk Semangka, dan Pantai Barat Provinsi Lampung.

Sedangkan kawasan budidaya non-pertanian di Provinsi Lampung meliputi :

1. Kawasan Pertambangan,

Arahan pola pemanfaatan bagi kawasan pertambangan meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung untuk golongan A dan B, serta sebagian Kabupaten dan Kota untuk golongan C sesuai delineasi kawasan lindung yang harus dipertahankan.

2. Kawasan Industri,

Pengembangan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh Kabupaten yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya.

Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di kawasan industri Tanjung Bintang di Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

3. Kawasan Pariwisata,

Pariwisata Provinsi Lampung dikembangkan di Way Kambas Sebagai model wisata Ekologi , Teluk Lampung, Kalianda, Kotabumi, Danau Ranau, dan CAL Krakatau. Wisata bahari sebagai obyek wisata yang potensial diarahkan di sekitar Teluk Lampung, mulai dari Kalianda hingga Padang Cermin, Teluk Kilauan, Pantai Barat Bengkunt serta kawasan Kepulauan Krakatau sebagai kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari berskala internasional.

2.4. Kebijakan Sosial Ekonomi Dan Budaya

Penduduk di Provinsi Lampung sangat heterogen terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Palembang dan lain-lain serta Lampung (sebagai penduduk asli). Oleh karena itu Lampung dikenal sebagai Sai Bumi Ruwa Jurai yang bermakna beragam adat, agama, budaya dalam satu wilayah. Dengan sejarah yang cukup panjang hidup

berdampingan dengan suku lain, maka terbentuknya toleransi sosial menjadi salah satu potensi pembangunan Provinsi Lampung.

Hubungan sosial diantara masyarakat yang heterogen tersebut cukup baik, saling menghormati serta mengikuti prinsip kehidupan yang dianut oleh masyarakat Lampung, yaitu:

Prinsip ke 1 : Pi'il Pasenggiri, artinya; Menjaga harga diri

Prinsip ke 2 : Sakai Sambayan, artinya; Suka tolong menolong

Prinsip ke 3 : Nemui Nyimah, artinya; Menaruh hati/ tangan terbuka

Prinsip ke 4 : Nengah Nyappur, artinya, Hidup bermasyarakat

Prinsip ke 5 : Bejuluk Beadek, artinya; Punya Status Sosial /Punya Identitas

Selain perangkat formal ditengah-tengah masyarakat seperti kelurahan termasuk LPM, LK, RT dan RW, umumnya terdapat lembaga lain yang cukup berperan seperti perkumpulan keluarga, pengajian dan lain-lain, serta tokoh informal yang menjadi teladan masyarakat sekaligus menjembatani persepsi masyarakat yang heterogen tersebut. Kegiatan musyawarah untuk membicarakan setiap masalah yang ada serta terbuka terhadap setiap perubahan positif yang terjadi sebagai implikasi dari pembangunan yang dilaksanakan telah menjadi salah satu budaya bagi sebagian besar masyarakat Provinsi Lampung. Mayoritas pekerjaan penduduk yang bergerak di sektor pertanian telah memberikan nilai tambah bagi perekonomian Provinsi Lampung, sebagai salah satu lumbung padi nasional, ditambah kontribusi yang cukup signifikan pada distribusi PDRB Provinsi Lampung selama ini.

Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi skala besar menjadi pembangunan ekonomi kerakyatan dengan sektor pertanian sebagai unggulan yang tidak terlalu tergantung dari bahan baku impor, dengan tetap berorientasi pada pasar domestik dan internasional. Pembangunan ekonomi skala besar yang sudah ada diarahkan sebesar mungkin kepada pola kemitraan

yang sinergik, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan mengembangkan kepedulian yang tinggi dari pengusaha besar untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil dan pengusaha menengah serta koperasi.

Strategi pembangunan pertanian berubah dari pertanian konvensional menjadi industri pertanian dari hulu hingga hilir yang saling terkait dengan pendekatan agrobisnis kerakyatan yang berwawasan lingkungan. Penekanan skala prioritas pada pembangunan pertanian rakyat yang secara tradisional telah berkembang, berorientasi ekspor, dan terkait dengan agroindustri kerakyatan.

Pengembangan komoditas baru tanaman pertanian diarahkan kepada komoditas yang berorientasi pasar, menguntungkan petani, mampu meningkatkan devisa daerah, yang memang potensial untuk dikembangkan tanpa harus menekan perkembangan komoditas tradisional yang sudah mantap.

Pengembangan pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi di segala sektor dan di semua wilayah sebagai upaya pembangunan kewiraswastaan dan kemitraan baru dengan dukungan manajemen, kredit permodalan, sumberdaya yang handal, pemanfaatan teknologi, informasi dan berpijak pada kekuatan ekonomi rakyat, serta partisipasi aktif para anggotanya yang tumbuh dan bawah. Pengusaha kecil/menengah dan koperasi harus tumbuh sebagai pelaku dunia usaha pada jalur utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan dukungan penuh dari Pemerintah untuk merealisasikannya agar menjadi maju dan mandiri.

Pembangunan ekonomi yang diarahkan tersebut diatas dirancang dan disusun sedemikian rupa agar tetap mampu mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Sesuai dengan Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTG HK, yang akan disesuaikan lebih lanjut) dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi sesuai dengan perubahan RTG HK dan terbentuknya Kabupaten/Kota baru. Paradigma yang dianut dalam penataan ruang ini adalah, terjaganya kelestarian lingkungan hidup, kelestarian lahan sawah beririgasi teknis, pemanfaatan lahan berdasarkan kesesuaian lahan yang paling menguntungkan untuk jangka panjang, kelestarian taman nasional, dan hutan lindung yang berfungsi hidro-orologis;

demokratisasi alokasi pemanfaatan sumberdaya untuk ekonomi kerakyatan; dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat dalam menghadapi era globalisasi, dengan agenda antara lain sebagai berikut:

1. Mengarahkan program pembangunan yang dibiayai dari sumber dana daerah pada prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya pada sektor pertanian rakyat dan industri kecil;
2. Mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan yang lebih sinergik pada berbagai kegiatan usaha tani, industri pengolahan hasil pertanian, pemasaran, dan keterkaitan serta kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, khususnya untuk komoditas jagung, singkong, kelapa sawit, tebu, kopi, karet, lada, ternak sapi, unggas dan perikanan;
3. Mengembangkan industri kecil pengolahan hasil pertanian seperti; Industri Tepung Tapioka Rakyat (ITTARA), Industri Gaplek Rakyat (IGARA), Industri Pakan Temak Rakyat (IPTERA), Industri Minyak Kelapa Rakyat (IMKERA), dan industri kerajinan, yang didukung oleh kemudahan kredit dari pemerintah, BUMN, dan dana bergulir;
4. Mencari terobosan pemasaran jagung dan mengupayakan kredit program pengadaan jagung melalui koperasi dengan pola kemitraan untuk menembus pasar ekspor dalam upaya meningkatkan pendapatan petani jagung;
5. Mengembangkan pilot proyek penggunaan pupuk alternatif untuk berbagai kegiatan usaha tani;
6. Pemanfaatan lahan tidur dengan tanaman yang produktif dengan dukungan pemerintah dan bermitra dengan perusahaan besar, menengah atau koperasi serta memberikan bantuan pembukaan usaha tani dengan pola kemitraan;
7. Mengembangkan kewiraswastaan masyarakat melalui pengembangan inkubator, klinik manajemen, manajer desa, dan kegiatan ekonomi kelompok masyarakat di

- pedesaan, sebagai embrio koperasi pedesaan;
8. Mengurangi angka pengangguran dan PHK melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja dengan mempersiapkan peren-canaan, ketenagakerjaan yang mampu menghadapi era globalisasi dan transfomasi struktural ketenagakerjaan, yakni dengan meningkatkan kesempatan kerja di sektor swasta dan sektor informal serta menurunkan kesempatan kerja di sektor pemerintah;
 9. Merancang ulang ("Redesign") RTG HK 1995 sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi pertanahan yang berkembang saat ini, diikuti dengan program aksi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan pengembangan budi daya terkendali dengan pendekatan hutan kemasyarakatan;
 10. Mengkaji kembali ("Review") RTRW Provinsi dan diikuti dengan kaji ulang RTRW Kabupaten/Kota dengan mengacu pada penyesuaian RTG HK dan pembentukan Kabupaten/Kota baru;
 11. Penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah antar pihak terkait untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha serta untuk menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik;
 13. Pengembangan teknologi untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di perdesaan;
 14. Penanganan dan pengembangan lanjut secara sistematis, terprogram, dan terarah berbagai bentuk polusi sungai dan laut dalam kebijaksanaan sungai dan laut bersih serta pantai lestari;
 15. Melanjutkan penanganan segera (*crash program*) penyelamatan ekonomi yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran masyarakat yang masih membutuhkan akibat krisis ekonomi yang masih berkepanjangan saat ini.

Upaya untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang, melalui peningkatan nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan sekaligus diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan berusaha merupakan kebijaksanaan pembangunan industri di Daerah Lampung. Pembangunan industri juga meningkatkan jumlah dan ragam ekspor komoditas hasil industri, menghemat devisa, menunjang Pembangunan Daerah dan pembangunan sektor lainnya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di daerah, baik potensi sumberdaya alam dan energi serta sumberdaya manusia melalui penguasaan dan penggunaan teknologi yang tepat guna dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Disamping itu dalam menata pertumbuhan industri di Daerah telah ditetapkan zone-zone industri di berbagai Kabupaten/Kota di daerah Lampung antara lain Kawasan industri (*industrial estate*) Lampung (KAIL), termasuk upaya pengembangan kawasan industri baru di bagian selatan Lampung.

Untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan baik untuk ekspor maupun konsumsi dalam negeri, maka selain meningkatkan pengolahan sumberdaya alam yang ada melalui diversifikasi produksi, diupayakan juga pemanfaatan limbah industri dengan teknologi daur ulang. Aplikasi ini harus didahului dengan studi mengenai kelayakan ekonominya dan dampaknya terhadap lingkungan.

Dalam upaya menanggulangi masalah pencemaran yang ditimbulkan oleh industri, maka setiap industri yang didirikan harus memperhatikan kelestarian lingkungan disekitarnya. Pembangunan industri tersebut mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan dalam bentuk AMDAL, serta pemanfaatan limbah dan pengembangan teknologi daur ulang.

Sektor pertanian termasuk didalamnya peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor primer yang mendukung pendapatan daerah Lampung dilanjutkan dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan, hal ini mengingat daerah Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Banten. Ditinjau dari mata pencahariannya sebagian besar penduduk hermeta pencaharian sebagai petani/nelayan, baik petani penggarap maupun pemilik, nelayan pantai maupun nelayan perairan darat seperti

empang dan rawa. Selanjutnya pedagang, danjasa seperti bidan, buruh, guru, penjahit, sopir, ojeg, pegawai, bengkel, wartel dan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi akan memacu peningkatan kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan penduduk Lampung. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja di masa datang akan berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal pengembangan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang dituju adalah pengurangan angka pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada tahap awal pengembangan perekonomian Provinsi Lampung, sektor primer akan berperan sebagai sektor andalan terutama untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi.

Keterbatasan lahan yang dapat dibudidayakan untuk pertanian akan menjadi kendala dalam penyerapan tenaga kerja, oleh karenanya pengembangan sektor lain, seperti perikanan, peternakan, dan pertambangan diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung.

BAB III

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

3.1. Konsep Dasar Analisis dan Evaluasi

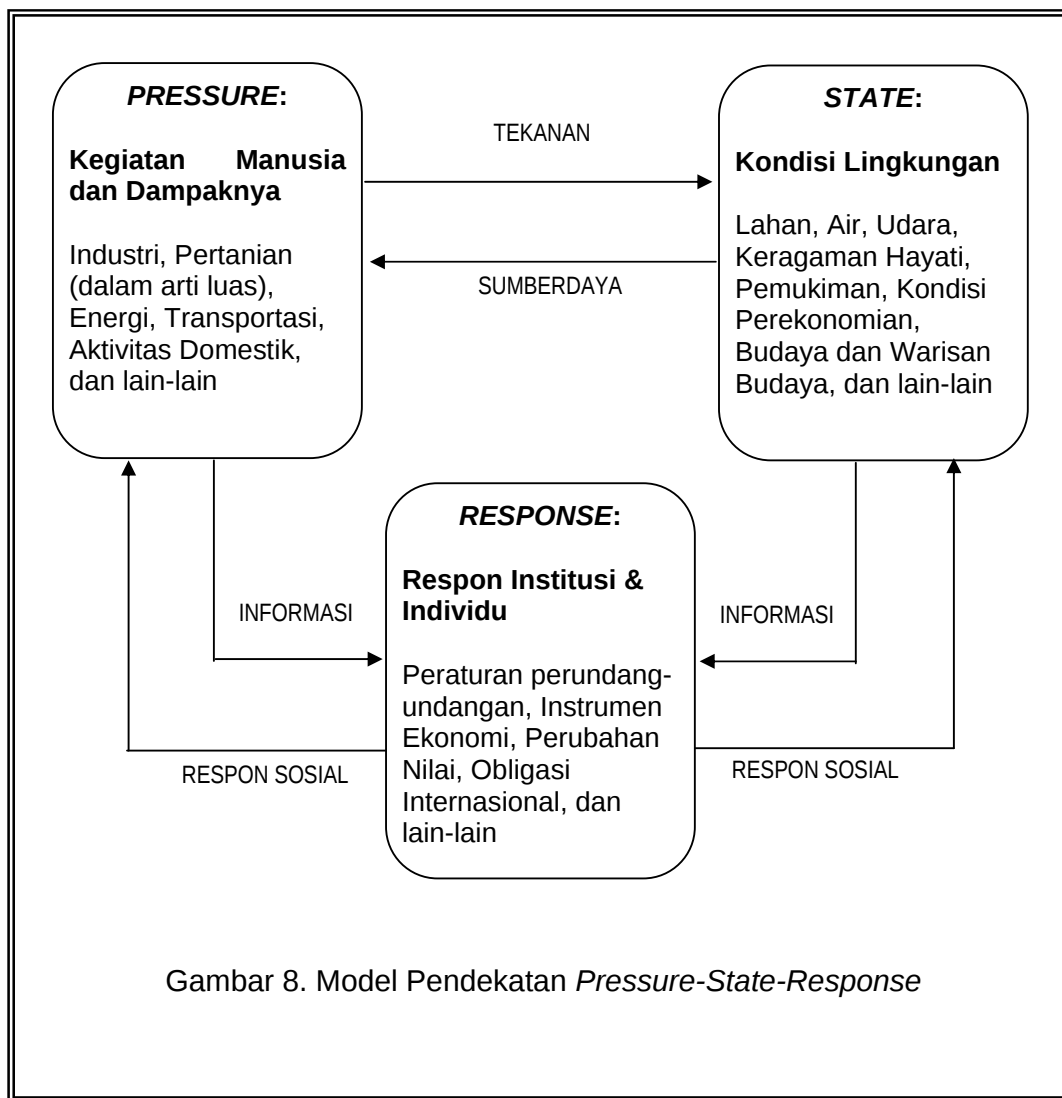
Analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan berdasarkan pada pendekatan Tekanan-Kondisi-Respon atau *Pressure-State-Response* (PSR) (Kementrian Lingkungan Hidup, 2006). Dalam pendekatan ini, tiga komponen utama yaitu kegiatan manusia dan dampaknya, kondisi lingkungan, serta respon institusi dan individu, digambarkan saling berinteraksi dan memberikan pengaruh antar satu komponen dengan komponen lainnya. Dengan mencermati pola interaksi antar komponen tersebut, dapat dilakukan eksplorasi mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi lingkungan, penyebab perubahan kondisi, serta instrumen yang dapat mengontrol perubahan kondisi lingkungan tersebut. Pada gilirannya, secara lebih konkrit eksplorasi tersebut akan bermuara pada analisis dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang bersifat komprehensif.

Beberapa sub-komponen penyusun dari ketiga komponen utama dalam pendekatan PSR adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Manusia dan Dampaknya (*Pressure*): Industri, Pertanian (dalam arti luas), Energi, Transportasi, Aktivitas Domestik, dan lain-lain.
2. Kondisi Lingkungan (*State*): Lahan, Air, Udara, Keragaman Hayati, Pemukiman, Kondisi Perekonomian, Budaya dan Warisan Budaya, dan lain-lain.
3. Respon Institusi dan Individu (*Response*): Peraturan perundang-undangan, Instrumen Ekonomi, Perubahan Nilai, Obligasi Internasional, dan lain-lain.

Secara ringkas komponen utama dan pola interaksinya dalam pendekatan PSR,

disajikan pada Gambar 8.



Dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Lampung Tahun 2006 ini, komponen *state* dan *pressure* disajikan dengan mengacu pada pada Buku II (Basis Data). Adapun komponen *response* disajikan dengan mengacu pada Bab II. Penyajian evaluasi dan analisis kebijakan selanjutnya dilakukan secara komprehensif dan dibagi menjadi komponen Sumberdaya Alam, Sumberdaya Buatan, dan Sumberdaya Manusia. Pada setiap pembagian tersebut telah meliputi gambaran mengenai kegiatan manusia yang menimbulkan tekanan lingkungan, kondisi

lingkungan eksisting, dan kebijakan penanggulangan kerusakan lingkungan.

3.2. Sumberdaya Alam

3.2.1. Sumberdaya Lahan

Luas daratan Provinsi Lampung yang mencapai 3.528.835 ha (termasuk pulau-pulau kecil), merupakan stok total bersifat tetap yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan manusia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi membutuhkan lahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tabel SDA-1 sampai dengan SDA-2 telah disajikan gambaran mengenai penggunaan lahan yang mencerminkan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Kebutuhan untuk aktivitas pertanian dan pemukiman telah bertambah secara signifikan pada semua wilayah kabupaten/kota.

Penggunaan lahan yang terbesar di Provinsi Lampung adalah kawasan hutan yang mencapai 833.847 ha (23,63% dari luas daratan), namun kawasan ini telah mengalami kerusakan parah (sekitar 70%) akibat tekanan pencurian kayu, perambahan hutan, dan perladangan. Pergeseran penggunaan lahan secara umum disebabkan oleh ekstensifikasi dan introduksi kawasan budidaya.

Sampai saat ini, ekstensifikasi dan introduksi kawasan budidaya umumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan, dan sebagai akibatnya telah terjadi perluasan lahan kritis yang telah mencapai luas 819.541 ha (23,43% dari luas daratan) (Tabel SDA-12), baik pada kawasan konservasi maupun pada kawasan budidaya. Lahan kritis terluas terdapat di Kabupaten Lampung Timur, kemudian Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Luas lahan kritis yang telah mendekati 25% dari luas wilayah Provinsi Lampung sudah selayaknya dijadikan sebagai perhatian yang sangat serius, mengingat dampaknya akan sangat besar terhadap sumberdaya alam lainnya. Kerusakan sumberdaya lahan, pada gilirannya juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk peta kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertanian dan pedesaan, akan sangat sulit tercapai.

Menilik pada kondisi dan penyebab kerusakan sumberdaya lahan, maka respon harus diberikan secara proporsional dan cepat. Penataan ruang harus dijadikan instrumen handal sebagai pengendali dan pemulih kerusakan sumberdaya lahan. Penataan ruang harus diimplementasikan secara mantap dengan didukung oleh instrumen perijinan penguasaan dan penggunaan lahan yang melibatkan berbagai instansi yang berkompeten seperti BPN dan Kehutanan, dan didukung oleh instansi teknis lainnya seperti Perkebunan, Pertambangan, dan Pertanian.

Secara lebih makro, kebijakan penggunaan lahan harus dilakukan melalui distribusi penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukungnya. Secara umum jenis tanah di Provinsi Lampung termasuk jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut, proses pembentukannya dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi dan pengaruh vegetasi hujan tropis. Sebagian besar jenis tanah pada topografi datar (kemiringan lereng 0-5%) mempunyai kemampuan daya dukung yang cukup baik, meliputi areal yang cukup luas terutama di bagian tengah dan timur. Pada wilayah ini dapat dilakukan ekstensifikasi kawasan budidaya, sementara pada wilayah dengan topografi yang lebih curam di bagian bagian barat (Lampung Barat dan Tanggamus), kawasan budidaya harus dikendalikan secara lebih ketat.

3.2.2. Sumberdaya Hutan

Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung menurut SK. Menhutbun No. 256/KPTS/II/2000 dan Perda Nomor 5/2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung tercatat seluas 1.004.735 Ha (BPS, 2003) atau 30,43% dari total luas wilayah Lampung.

Sumberdaya hutan sangat potensial dalam menopang pembangunan, menghasilkan produk ganda berupa barang dan jasa. Produk barang yang dapat diambil dari hutan berupa komoditas kayu dan non kayu. Sedangkan produk jasa berupa pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir, penstabil iklim, dan pengembangan ilmu dan teknologi.

Hutan di Provinsi Lampung menurut fungsinya dikelompokkan menjadi beberapa kawasan hutan, yaitu :

- a. Kawasan hutan Lindung
- b. Kawasan Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, meliputi :
 - Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
 - Taman Nasional Way Kambas
 - Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman
 - Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan
 - Cagar Alam Laut Krakatau
- c. Kawasan Hutan Produksi yang meliputi :
 - Hutan Produksi Terbatas
 - Hutan Produksi Tetap

Penetapan kawasan (seperti disajikan pada Tabel 3-1) ternyata tidak menjamin kelestarian fungsi lindung dari kawasan hutan, hal ini disebabkan oleh adanya perambahan hutan dan alih fungsi lahan yang berlangsung terus menerus yang menyebabkan kawasan budidaya secara nyata terus bertambah. Data pada Tabel SDA-9 menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan hutan sampai tahun telah mendekati angka 60% dari luas total kawasan hutan. Kerusakan terparah terjadi pada hutan lindung, dengan tingkat kerusakan telah mencapai 63,73%. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa fungsi lindung kawasan hutan di Provinsi Lampung saat ini hanya tinggal sekitar 11,82% dari total luas daratan. Kondisi tersebut sangat jauh dari kondisi ideal yang dikehendaki, yaitu fungsi lindung kawasan hutan harusnya meliputi minimal 30% dari total daratan.

Tabel 3-1 Luas Kawasan Hutan dan Budidaya Di Provinsi Lampung

No	Kawasan	Luas (ha)	%
1	Hutan Lindung	317.615	31,61
2	Hutan Produksi Terbatas	33.358	3,32
3	Hutan Produksi Tetap	191.732	19,08

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

4	Suaka Alam & Hutan Wisata	462.030	45,99
Jumlah		1.004.735	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006)

Kerusakan hutan di Provinsi Lampung telah menyebabkan dampak turunan berupa peningkatan erosi, banjir, tanah longsor (kecamatan Padang Cermin, Wonosobo, Cukuh Balak, Kota Agung, dan Krui), penurunan kualitas badan air, dan pendangkalan waduk.

Menyadari kondisi kerusakan hutan dan pentingnya fungsi lindung hutan, maka seharusnya segera diimplementasikan berbagai kebijakan di bidang sumberdaya hutan dan lingkungan. Kebijakan yang dapat ditempuh yang meliputi rehabilitasi kerusakan hutan, mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut, dan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kawasan hutan.

Upaya penghijauan dan reboisasi, ditujukan untuk menurunkan erosi dan sedimentasi, pengendalian banjir dan kekeringan, meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani di daerah kritis, serta mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Selain itu dilakukan pula program rehabilitasi lahan kritis yang ditujukan untuk meningkatkan sumber mata pencarian baru di daerah kritis.

Sasaran kegiatan dalam program rehabilitasi lahan kritis antara lain adalah rehabilitasi lahan kritis di areal pertanian tanah kering (untuk penghijauan) pada kawasan budi daya dan rehabilitasi lahan kritis di areal kawasan lindung, suaka alam dan kawasan lindung lainnya melalui program reboisasi serta kegiatan percontohan rehabilitasi lahan kritis pada lokasi eks galian C.

Penghijauan dan reboisasi dilaksanakan dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif. Manfaat kegiatan tersebut setidaknya-tidaknya bagi masyarakat setempat, dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didalamnya mencakup peningkatan sumberdaya manusia dan peranserta masyarakat sebagai faktor utama. Pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuh kembangkan melalui penyuluhan, penerangan dan pendidikan, pemberian stimulasi/insentif,

penegakan hukum yang disertai dengan dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi nasional.

Penghijauan dan Reboisasi ditujukan untuk meningkatkan mutu dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), ketersediaan sumberdaya baru untuk pembangunan di daerah, kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat di daerah kritis serta meningkatkan fungsi hidro-orologis dan daya dukung lingkungan.

Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa berupaya agar program penghijauan dan reboisasi tetap dapat terlaksana secara berkesinambungan baik pada tingkat Provinsi maupun pada Kabupaten/Kota, antara lain kegiatan penghijauan dan reboisasi Korpri dan Pemuda, pelaksanaan kegiatan penanaman seribu pohon, PPKAN, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) serta program daerah “ **Berani Kawin Berani Tanam Pohon**”.

Program “ Berani Kawin Berani Tanam Pohon “ merupakan bentuk ide dan pemikiran daerah Lampung tahun 2001 yang ditekankan kepada calon pengantin agar melakukan penanaman minimal 10 pohon per calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahannya. Bentuk kegiatan ini telah mendapat dukungan dari MENLH dan Departemen Kehutanan serta telah di sebarluaskan sebagai Himbauan Nasional kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Keberadaan program tersebut dimaksudkan guna menggelorakan gerakan penanaman pohon berbasis masyarakat serta mempercepat keberhasilan penghijauan lingkungan serta dengan mempertimbangkan bahwa hasil tanaman penghijauan akan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Dengan program ini diharapkan akan segera dapat diwujudkan wilayah yang hijau, lingkungan yang sehat dan dapat meningkatkan potensi sumberdaya alam serta kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan hutan juga dilakukan melalui pengembangan Taman Nasional dan Taman Hutan Raya, melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Menekan laju kerusakan dan kepunahan sumberdaya alam hayati dan ekosistem

dengan menerapkan pola pendekatan sosial, meningkatkan upaya perlindungan, memberdayakan dan pengamanan-an, serta penegakan hukum.

- Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan taman nasional.
- Menyajikan data dan informasi yang akurat serta melakukan upaya promosi potensi sumberdaya alam dan obyek wisata alam yang mampu menarik minat investasi dan pengunjung.
- Memantapkan dan meningkatkan organisasi pengelola taman nasional.
- Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistem pembentukan Taman Nasional yang mampu meningkatkan kepedulian, peranserta dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga baik swasta maupun masyarakat. Dalam rangka mengintegritaskan pengelolaan taman nasional dengan pembangunan daerah dan sektor terkait.
- Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung pengelolaan.

Contoh konkrit pengelolaan Taman Nasional adalah pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Lampung Barat. Pengelolaan TNBBS dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan taman nasional. Upaya tersebut akan berhasil apabila mampu membuktikan besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan kawasan taman nasional dengan seluruh potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Semua potensi ekosistem yang ada seperti keindahan, gejala dan fenomena alam serta flora dan fauna liar dapat digali, dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi potensi ekonomi, masyarakat sekitar, daerah dan nasional.

Dalam rangka perubahan paradigma pengelolaan yang ingin mengutamakan

kepentingan masyarakat lokal, perlu dikembangkan pola pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang berbasis masyarakat (*Community Based Conservation and Park Management*) yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Pengelolaan taman nasional dengan paradigma baru tersebut dilaksanakan dengan merubah fungsi zona-zona tertentu untuk memberikan lebih banyak akses masuk bagi masyarakat dalam berperanserta secara aktif dalam pengelolaan taman nasional.

Penentuan dan pengukuhan zona-zona pemanfaatan tradisional yang selaras dengan fungsi dan tujuan untuk pengelolaan taman nasional diperhitungkan merupakan kebijaksanaan yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan taman nasional yang berwawasan ekologis sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dilaksanakan dengan merubah metode dan teknik pengelolaan taman nasional yaitu dengan memberdayakan semua staf lapangan melalui pendidikan, latihan, penataran, pembuatan buku pedoman, juklak/juknis/protap, manual dan kuisisioner sebagai pegangan petugas lapangan sesuai kondisi spesifik wilayah kerja/wilayah konservasi.

Termasuk pula dalam upaya revitalisasi ini adalah peningkatan organisasi ditingkat lapangan melalui pembentukan 1 (satu) Sub Seksi Wilayah Konservasi di Provinsi Bengkulu dengan mempertimbangkan luas wilayah, permasalahan, tantangan dan hambatan pengelolaan, koordinasi dan otonomi daerah. Dengan revitalisasi ini diharapkan kesejahteraan staf lapangan dapat lebih adil merata, meningkatkan motivasi kerja dan pengelolaan kawasan dapat lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Berjalannya fungsi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- Berjalannya fungsi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai

kawasan pengawetan hidupan liar dan ekosistemnya.

- Berjalannya fungsi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai kawasan pemanfaatan berkelanjutan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, penunjang budidaya, rekreasi dan wisata alam.
- Meningkatkan kepedulian, peranserta dan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan upaya-upaya pemanfaatan berkelanjutan potensi hidupan liar dan ekosistem pembentuk kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- Terintegrasinya pengelolaan dan pembangunan Taman Nasional dengan pembangunan daerah dan sektor terkait.

Untuk menuntaskan masalah kehutanan yang sangat kompleks dan selalu muncul, kemudian mereda dan ada kemungkinan bertambah lagi maka peranserta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan sumberdaya alam yang sangat bernilai bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Perambahan dikawasan hutan terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang, akibat beribu-ribu hektar hutan gundul dan beralih fungsi. Hal ini terjadi karena desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya dan tidak adanya lahan pertanian yang dimiliki.

Upaya mengatasi dan menekan jumlah perambah melalui pendekatan persuasif antara lain penanaman kembali dengan prioritas bibit tanaman damar mata kucing, karena ternyata damar mata kucing selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah juga untuk menyelamatkan hutan, terutama untuk daerah pesisir (Si Mata Kucing Penyelamat Hutan).

Pemanfaatan damar mata kucing didaerah penyangga pada dasarnya merupakan penerapan sistem *agroforest* yang berpotensi mendorong tumbuhnya sentra produksi damar dan pusat kegiatan bisnis baru yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi. Maka kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sementara ini kawasan konservasi dapat

ditekan.

Di sisi lain, perlu dilakukan pemberdayaan lembaga dan hukum adat untuk menjaga kelestarian hutan. Jika lembaga-lembaga adat yang ada bersatu dan membuat aturan-aturan dalam menangani masalah-masalah hutan, damar dan sumberdaya alam lainnya, maka sumberdaya alam akan tetap lestari dan memberikan kontribusi peningkatan penghasilan masyarakat di wilayah tersebut. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kelembagaan adat antara lain adalah:

- Hutan adat di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit
- Hutan adat di Desa Sebarus Kecamatan Balik Bukit
- Hutan Kesepakatan (hutan kalpataru) di Desa Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong
- Repong damar di Pesisir Krui

“Tiada Damar Malam Jadi Gulita” pepatah tersebut dikenal sebelum adanya minyak tanah, di mana masyarakat yang tinggal di pelosok Lampung menggunakan damar sebagai alat penerang. Sistem pengelolaan terakomodasikan dalam lembaga-lembaga adat menyebabkan anggotanya merasa terhormat bila mampu menjaga dan mengembangkan kebun damar secara turun temurun. Kebun damar yang dikelola dengan sistem Repong dikenal dengan Repong Damar, tidak saja mampu meningkatkan ekonomi keluarga juga penyangga dan sabuk pengaman taman nasional. Kebun damar selain memiliki bentuk hutan dan juga berperan bagi pelestarian jenis flora dan fauna serta konversi tanah dan air.

3.2.3. Sumberdaya Air

Air merupakan sumberdaya yang mutlak dibutuhkan untuk kehidupan dan aktivitasnya. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih dengan jumlah penduduk dan tingkat permintaannya membutuhkan suatu kearifan dalam penggunaan sumberdaya alam tersebut. Secara alami, sumberdaya air termasuk

sumberdaya yang dapat diperbaharui, namun dalam kasus-kasus tertentu sumberdaya ini mengalami perubahan potensi menjadi sumberdaya alam tak terbaharui.

Secara geografis Daerah Lampung memiliki 5 (lima) *River Basin*, atau *Daerah Aliran Sungai*. Daerah hulu Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Ke-lima river basin tersebut yaitu:

1. Daerah *River Basin* Tulang Bawang terletak di Utara hingga ke arah Barat, melewati wilayah Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, memiliki luas mencapai 10.150 km² dan panjang 753,5 km dengan 9 cabang anak sungai membentuk pola aliran *dendritic*, yang merupakan ciri umum sungai-sungai di Lampung. Kepadatan (*density*) pola aliran sebesar 0,07 dan frekuensi pola aliran 0,0009.
2. Daerah *River Basin* Seputih terletak di bagian tengah wilayah bagian Barat Lampung Tengah ke arah Metro dan Lampung Timur. Luas *River Basin* ini mencapai 7.550 km² dan panjang 965Km, jumlah cabang sungai sebanyak 14 buah, dan kepadatan (*density*) pola aliran 0,13 dan frekuensi pola aliran 0,0019.
3. Daerah *River Basin* Sekampung terletak di sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan bagian Utara, hingga ke arah Timur. Luas *River Basin* ini mencapai 5.675 km² dengan panjang 623 km dan 12 cabang sungai. Pola aliran mencapai kepadatan 0,11 dan frekuensinya mencapai 0,021.
4. Daerah *River Basin* Semangka terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus bagian Selatan dan Barat ke arah Pantai Selat Sunda bagian barat. Luas *River Basin* ini 1.525 km² dengan panjang 189 km, kepadatan (*density*) pola aliran 0,12 dan frekuensi pola aliran 0,0052.
5. Daerah *River Basin* Way Jepara terletak di Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 800 km², dan panjang sungai mencapai 108.5 km, jumlah cabang sungai 3 buah dan pola aliran dengan kepadatan (*density*) 0,14 serta frekuensi 0,0038.

Daerah *River Basin* ini sebagian besar dimanfaatkan sebagai daerah pengembangan sawah irigasi teknis dengan luas keseluruhan mencapai 295.544 Ha (areal potensial 285.376 Ha, areal baku 264.768 Ha, dan areal fungsional 190.959 Ha). Pengembangan areal *river basin* untuk daerah irigasi terus dilakukan. Wilayah yang sedang dikembangkan adalah di *River Basin* Mesuji Tulang Bawang, yang sebagian areal irigasinya berada di Sumatera Selatan, yaitu daerah irigasi Komering yang akan mampu mengairi areal sawah seluas 120.000 Ha. Untuk Sumatera Selatan 75.000 Ha sedangkan Provinsi Lampung memperoleh manfaat untuk luas 45.000 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang.

Berdasarkan Ratio Debit musim hujan dan musim kemarau, hampir seluruh daerah aliran sungai mencatat angka fluktuasi debit air yang tinggi dari

61,08% hingga 429,77%, kecuali Way Semangka 6,7% dan Way Rarem 23,24%. Kondisi ini menyebabkan kekurangan air pada musim kemarau tetapi kelebihan air pada musim hujan. Penyebab utamanya adalah rusaknya fungsi hidro-orologis kawasan hutan lindung dan kondisi tanah setempat yang relatif *porous*.

Perbedaan debit air sungai pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan pengendalian tata air yang memungkinkan pemanfaatan curah hujan secara optimal bagi kebutuhan air pada musim kemarau, yang antara lain dapat diupayakan melalui pembangunan waduk atau embung.

Pada sisi lain, kualitas sumberdaya air sungai mengalami penurunan yang cukup tinggi. Menurut pemantauan Bapedalda, paling tidak 3 (tiga) sungai besar di Provinsi Lampung secara intensif dialiri oleh limbah industri yaitu Way Pengubuan, Way Sekampung, dan Way Tulang Bawang. Way Pengubuan memiliki kisaran nilai oksigen terlarut (*Biological dan Chemical Oxygen Demand-BOD dan COD*) yang tertinggi dibandingkan dua sungai lainnya yaitu 123.296 mg/lit untuk *BOD* dan 220 - 389 mg/lit untuk *COD*. Hal ini disebabkan karena sungai tersebut merupakan tempat pembuangan limbah bagi industri tapioka, pulp, karet dan pabrik gula. Limbah industri ini sebagian besar mengalir ke pantai Timur, sebagian kecil ke Teluk Lampung

dan Teluk Semangka yang mengakibatkan menurunnya kualitas perairan di sekitar wilayah tersebut.

Selain untuk kepentingan irigasi dan domestik lainnya, sumberdaya air tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan data PLN tercatat ada 4 lokasi sungai potensial dan 1 waduk yaitu Way Semangka Atas (*upper*) dengan potensi 78 MW, Way Semangka Bawah (*lower*) dengan potensi 76 MW, Way Semung dengan potensi 2,6 MW, Batu Tegi 2x25 MW, dan Way Besay dengan potensi 2x45MW.

3.2.4. Sumberdaya Mineral

Sumberdaya mineral yang telah dimanfaatkan di Provinsi Lampung baru terbatas pada galian golongan C (bahan industri dan konstruksi), dan beberapa kelompok golongan B (vital) yang meliputi emas, perak, dan besi. Eksploitasi yang telah dilakukan masih berada di bawah potensi cadangan mineral, sebagaimana disajikan pada Tabel SDA-50.

Beberapa potensi Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung tahun dapat di inventarisir sebagai bahan galian adalah sebagai berikut:

- a. **Bahan Galian Energi;** terdiri dari Batubara yang terdapat pada masing-masing wilayah di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang.
- b. **Bahan Galian Logam;** terdiri dari Biji Besi, Pasir Besi dan Emas dmp di Kabupaten Lampung Selatan; Biji Besi dan Emas di Kabupaten Lampung Tengah; Emas dmp, Mangan di Kabupaten Tanggamus; Emas dmp di Kabupaten Lampung Barat dan Way Kanan dan Kota Bandar Lampung.
- c. **Bahan Galian Industri;** berupa Batu Gamping, Zeolit dan Feldspar di Kabupaten Lampung Selatan; Feldspar dan Batu Gamping di Kabupaten Lampung Tengah; Zeolit, Bentonit dan Gamping di Kabupaten Tanggamus; Perlit, Diatome dan Trass

di Kabupaten Lampung Barat; Batu Gamping, Kaolin dan Bentonit di Kabupaten Way Kanan; Trass dan Kaolin di Kota Bandar Lampung serta Pasir Kwarsa di Kabupaten Tulang Bawang.

- d. **Bahan Galian Konstruksi**; berupa Andesit, Marmer, Granit, Pasir, Batu Hitam/Basalt, Tanah Liat, Rijang dan Dasit di Kabupaten Lampung Selatan; Granit, Pasir dan Andesit di Kabupaten Lampung Tengah; Andesit di Kabupaten Lampung Timur; Andesit, Granit, Lempung dan Marmer di Kabupaten Tanggamus; Pasir, Sirtu, Lempung, Andesit, Batu Gamping dan Koral di Kabupaten Lampung Barat; Andesit, Pasir dan Breksi Vulkanik di Kabupaten Lampung Utara; Lempung, Marmer, Batu Mulia dan Rio Dasit di Kabupaten Way Kanan; Batu Hitam/Basalt, Breksi Vulkanik dan Andesit di Kota Bandar Lampung; serta Lempung di Kabupaten Tulang Bawang.

Selanjutnya berdasarkan literatur, data dan peta Geologi Daerah Lampung terinventarisir bahan galian (bahan tambang) lainnya selain yang terdapat pada data di atas, yaitu:

1. **Minyak Bumi**; terdapat dalam lapisan Palembang Bed berakumulasi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi di sekitar Palembang, yaitu terletak di sebelah timur laut Provinsi Lampung sekitar Mesuji, Menggala, Kotabumi, dan Sukadana. Penelitian yang dilakukan oleh Pertamina belum memastikan potensi minyak bumi serta kemungkinan sumber di lepas Pantai Timur Lampung.
2. **Uranium** ; Endapan uranium kemungkinan terdapat terutama di dalam massa batuan granit yang tersingkap di bukit arah barat Way Semangka, Gedong Surian, Bukit Seming, dan Bukit Lematang di sebelah timur Telukbetung dan Pulau Tabuhan. Pengamatan dan penyidikan potensi uranium sedang dilakukan oleh Direktorat Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral beserta Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
3. **Sumber Air Panas dan Gas Bumi** ; Sumber Air Panas dan Gas Bumi merupakan aktivitas vulkanik air panas, yaitu yang mengandung belerang H₂S dan CO₂ terdapat di Natar dan Way Ngarip serta air panas di dekat Kota Agung dan Way

Muli Kalianda. Temperatur berkisar antara 40-50°C, bahkan di lembah Suoh mencapai 95°C dan Way Muli Kalianda mencapai titik didih. Sumber Gas Bumi di Lembah Suoh dinyatakan oleh Direktorat Geologi memiliki potensi untuk dikembangkan.

Pengelolaan sumberdaya mineral akan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya yang meliputi sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan sumberdaya lahan. Aktivitas pertambangan (terutama galian C) cukup potensial menjadi sumber degradasi lingkungan seperti penggalian batu dan pasir, yang menyebabkan hilangnya vegetasi dan peningkatan erosi tanah. Adapun penggalian logam seperti emas dan perak berpeluang menjadi sumber pencemar perairan akibat proses pengolahan bijih yang menghasilkan limbah berupa tailing dan terlepasnya logam berat terutama air raksa (Hg) yang berbahaya ke badan air. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan cermat yang mencakup mulai dari proses perijinan, pengawasan pelaksanaan penambangan, dan sampai pada reklamasi lahan bekas tambang. Instansi yang berkompeten dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan, yang terkait dengan Dinas Kehutanan dan Bapedalda.

3.2.5. Sumberdaya Udara

Udara merupakan salah satu unsur alam yang pokok bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi terutama manusia. Tanpa udara yang bersih maka manusia akan terganggu terutama keselamatannya yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kualitas udara ambien dari suatu daerah ditentukan oleh daya dukung alam daerah tersebut serta jumlah sumber pencemaran atau beban pencemaran dari sumber yang ada di daerah tersebut. Kualitas udara khususnya di perkotaan merupakan komponen lingkungan yang sangat penting, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat maupun kenyamanan kota.

Sumber pencemaran udara di Provinsi Lampung secara umum terdiri dari 2 (dua) sumber utama pencemaran yaitu dari sumber utama yang tidak bergerak dan sumber utama yang bergerak. Sumber utama yang tidak bergerak antara lain kegiatan industri pengolahan adalah proses aktivitas industri dengan menggunakan teknologi guna

menghasilkan barang. Disamping proses produksi yang merupakan sumber pencemaran, kegiatan pembakaran bahan bakar yang dipergunakan untuk proses utilitas industri juga merupakan sumber pencemaran udara.

Kegiatan-kegiatan industri di Provinsi Lampung yang menimbulkan pencemaran udara dalam proses produksinya antara lain; industri monosodium glutamat (MSG), industri arang aktif, industri pakan ternak, industri sodium glutamat, industri pakan udang, industri pemecah batu, industri gula, industri minyak sawit (CPO), industri tapioka, dan industri pengalengan nanas.

Dari hasil pengukuran kualitas udara pada beberapa pabrik tersebut secara keseluruhan dengan parameter yang digunakan menunjukkan bahwa kadar pencemaran udara masih di bawah ambang batas kecuali beberapa pabrik/industri yang melebihi ambang batas/baku mutu terutama pada unsur debu yang terbesar di lokasi pabrik pemecah batu pada PT. Sumber Batu Berkah, polutan debu yang tertinggi pada saat pabrik produksi waktu siang hari dimusim kemarau, untuk mengatasinya telah dilakukan antisipasi melalui berbagai upaya antara lain dilakukan penyiraman pada areal sekitar, hal inipun terjadi karena produksinya pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan kualitas udara pada lokasi pabrik tersebut masih dalam ambang batas baku mutu udara.

Sedangkan sumber pencemar utama dari sumber bergerak adalah kendaraan bermotor dengan polutan berupa karbon monoksida sebesar lebih kurang 60% dan polutan berupa hidrokarbon berkisar lebih kurang 15%.

Provinsi Lampung sebagai daerah transit dan lalu lintas antar pulau dan antar Provinsi memiliki potensi terjadinya pencemaran akibat buangan kendaraan bermotor. Sedangkan beban pencemaran dari transportasi kota masih relatif rendah karena sarana dan prasarana yang cukup memadai baik kualitas jalan maupun kendaraan operasional yang telah dibatasi masa berlakunya izin trayek (izin operasional).

Pengendalian pencemaran udara adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menurunkan jumlah dan kadar pencemaran udara dari sumber.

Secara umum kondisi kualitas udara di Provinsi Lampung masih relatif baik, meskipun demikian upaya pencegahan dan mempertahankan kondisi tersebut melalui kegiatan monitoring secara berkala terhadap industri-industri potensi sumber pencemar tetap dilakukan, dikaitkan pula dengan telah adanya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660.33/0298/Bapedalda/ 2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pemeriksaan Mutu/Kualitas Udara di Daerah.

Kegiatan pengendalian pencemaran udara juga dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi peraturan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan dunia usaha, terutama pada industri-industri yang dalam proses produksinya berpotensi besar menyebabkan pencemaran udara

Upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang melibatkan seluruh komponen masyarakat merupakan langkah nyata untuk terlaksananya program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh berbagai pihak tersebut antara lain :

a. Peran Pemerintah Daerah

- Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Hutan Kota serta penyelamatan jalur hijau di wilayah perkotaan sebagai paru-paru kota.
- Penertiban kendaraan bermotor yang tidak layak jalan terutama kendaraan angkutan kota dengan pembatasan ijin trayek dan wajib uji kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah.
- Pemantauan secara berkala dan pengujian kualitas udara pada beberapa titik yang rawan polusi akibat kepadatan lalu lintas sebagai bahan evaluasi terhadap kemungkinan dilakukannya pola penanganan dan penanggulangan bila terjadi penyimpangan dari ambang batas yang ditoleransi.

b. Peranserta masyarakat dan mitra lingkungan

- Mendukung program pemerintah melalui peransertanya dalam langkah-langkah sosialisasi dilingkungannya dengan pemahaman dan ketaatannya terhadap kelestarian lingkungan.

3.2.6. Rawa (Lahan Basah)

Kondisi rawa di Provinsi Lampung khususnya di pantai timur saat ini banyak yang dikeringkan dan dikonversi menjadi tambak dan persawahan sehingga fungsi rawa banyak yang telah berubah. Sisa paya-paya, rumput, dan gelagah yang masih ada di sepanjang Way Mesuji, Way Tulangbawang, dan Way Seputih - Way Sekampung merupakan kolam raksasa pengendali banjir. Rawa terdapat juga disekitar Taman Nasional Way Kambas tepatnya sekitar wilayah Way Kanan.

Rawa-rawa air tawar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) memiliki kekayaan hayati flora dan fauna yang cukup tinggi serta bentang alam berupa hamparan rawa seluas ± 86.000 ha, termasuk rawa payau/ mangrove dibagian muara/ pantai Timur Lampung, berdasarkan hasil survei Asian Wetland Bureau (1994) dan BKSDA D, ditemukan 141 jenis tumbuhan, terdapat beberapa populasi burung air, serta ditemukan 88 species ikan dari 24 famili. Saat ini kondisi alamnya mulai berubah akibat eksploitasi yang tidak bijaksana, rawa-rawa ini telah mengalami penurunan kualitas, baik luas maupun keanekaragaman hayati di dalamnya.

Konservasi sumberdaya alam merupakan bentuk pengelolaan sumberdaya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Berdasarkan analisis dan telaahan pengelolaan areal rawa akan lebih baik bila dikelola dengan sistem konservasi sehingga manfaatnya dapat tetap terjaga secara berkesinambungan, mengingat upaya konservasi merupakan suatu bentuk upaya menjaga dan mendukung peningkatan kelestarian potensi keanekaragaman hayati

sekaligus pemanfaatan secara lestari sehingga dapat tetap mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan.

Dari hasil penelitian Wetland Internasional (1994), rawa-rawa disekitar DAS tersebut merupakan wilayah yang sangat memenuhi kriteria Konvensi Ramsar sebagai wilayah pelestarian, dengan pertimbangan manfaat:

1. Merupakan contoh yang baik sebagai areal lahan basah alami atau mendekati alami yang khas untuk suatu wilayah biogeografi yang ditumbuhi oleh rumput *Phragmites* dan gelam (*Melaleuca cajuputi*)
2. Memiliki nilai penting bagi masyarakat sekitarnya dalam hal penyediaan makanan. Rawa-rawa ini menghasilkan ikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk sebagai sumber mata pencaharian.
3. Merupakan habitat sejumlah jenis tumbuhan atau hewan yang telah langka, rentan atau terancam kepunahan seperti jenis-jenis burung antara lain; Serati Hutan/Itik Rimba (*Cairina cinerea*), Burung Tongtong (*Leptopulos javanicus*), wilwo/Bluwok (*Mycteria cinerea*), Burung Jing (*Metopidius indicus*) dan Blibis (*Nettapus coromandelianus*). Bangau tongtong dan wilwo adalah jenis burung yang terancam kepunahan di Indonesia dan telah tercatat dalam *Red Data book* dan IUCN dalam kategori *vulnerable*, sedangkan burung jing dan blibis adalah jenis burung yang telah langka.
4. Secara tetap lokasi ini menyokong kehidupan 1% populasi dunia dari suatu jenis atau anak jenis burung air. Sekurangnya 53 ekor atau lebih Burung wilwo di temukan di daerah rawa Tulang Bawang.
5. Merupakan kantong air atau penyimpan cadangan air serta pengendali limpasan air sungai pada musim hujan dimana tumbuhan rawa dapat memperlambat aliran air sehingga dapat menahan erosi dan banjir.
6. Merupakan pelindung terhadap bencana alam, karena tumbuhan rawa dapat

menahan abrasi gelombang air laut dan akar tumbuhan rawa berfungsi mengikat bahan organik, menahan angin dan membantu pengendapan lumpur sedimen serta pencegah intrusi air laut karena adanya rawa-rawa dapat membuat air tanah menjadi jenuh dengan air tawar sehingga dapat menghambat masuknya air laut ke lapisan tanah.

7. Sebagai penjaga iklim mikro pada ekosistem yang ada di sekitarnya dengan cara mempertahankan penguapan lokal yang penting untuk menjaga kelembaban dan turunnya hujan. Selain itu vegetasi lahan basah berpengaruh dalam proses hidrologis dan penguapan air serta mengurangi kecepatan air permukaan yang dapat merusak.
8. Memiliki potensi wisata dan rekreasi serta sarana penelitian.

Dari hasil penelitian Wetland Internasional ini sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka wilayah ini juga memenuhi kriteria *Important Bird Area* (IBA) yang dikeluarkan oleh Bird Life Internasional sehingga wilayah ini menjadi ekosistem yang sangat penting bagi Indonesia maupun dunia.

Pengelolaan rawa saat ini belum memiliki arah yang jelas serta kegiatan yang tidak melalui rencana yang cermat, sehingga nampak rawa seperti daerah “tidak bertuan”. Beberapa masalah yang mengancam keberadaan DAS, antara lain :

1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan kawasan lindung oleh perkebunan dan kegiatan budidaya lainnya.
2. Aktivitas masyarakat sekitar dalam memanfaatkan rawa yang berpotensi merusak antara lain : menangkap burung-burung air, membuka areal persawahan dengan menebang pohon-pohon gelam pada saat rawa mulai mengering, menangkap ikan dengan racun dan setrum serta membuat lobang/siring sebagai tempat berkumpulnya ikan yang akan di penen pada saat rawa mulai mengering, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

3. Wilayah DAS berpotensi ekonomi namun belum berkembang sesuai dengan kaidah konservasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.
4. Keberadaan hukum adat yang telah lama ditinggalkan baik oleh masyarakat adat telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam pemilikan lahan dan pengelolaan DAS secara arif.

Untuk mendorong terwujudnya kelestarian rawa sangat diperlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholders antara lain melalui penetapan sebagai wilayah yang berfungsi lindung dengan aturan hukum oleh pemerintah setempat serta lebih banyak melibatkan dan mengakomodir keberadaan masyarakat setempat melalui pelaksanaan kegiatan yang dapat mempercepat terwujudnya rawa sebagai kawasan konservasi.

Dalam mewujudkan hal tersebut Bapedalda Provinsi Lampung telah mengusulkan kawasan rawa sebagai salah satu kawasan lindung dalam rancangan peraturan daerah (RAPERDA) kawasan lindung Provinsi Lampung, selain itu melaksanakan pula upaya-upaya antara lain:

- a. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup melalui penyuluhan-penyuluhan tentang pengetahuan ilmu lingkungan, pengetahuan tentang bagaimana melakukan konservasi, apa yang harus dilestarikan dan teknik-teknik pelaksanaan konservasi.
- b. Sistem informasi pengelolaan lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan penelitian guna menghimpun data pendukung seperti potensi keanekaragaman hayati, sosial ekonomi, publikasi dan dokumentasi bagi para stakeholder lingkungan.
- c. Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong keluarnya kebijakan ekonomi dalam pemanfaatan DAS yang dapat mendukung pendapatan asli daerah, dengan kriteria tidak merusak kawasan, signifikan untuk meningkatkan pendapatan, teknologi mudah dilaksanakan dan masyarakat

mendukung pelaksanaannya.

- d. Bantuan bibit untuk sempadan sungai (tanaman tahunan) yang memiliki daya dukung terhadap erosi sempadan sungai sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
- e. Sosialisasi ke desa-desa transmigrasi di sekitarnya; mengingat wilayah ini juga dikelilingi masyarakat pendatang (transmigrasi), maka untuk mencapai sasaran dan tujuan juga dilakukan pendekatan agar terdapat kesamaan pandang secara keseluruhan dari masyarakat disekitar tentang wilayah pengelolaan sehingga upaya konservasi wilayah rawa dapat terwujud.
- f. Adanya kerjasama antara lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan rawa baik dalam bentuk kemitraan maupun dalam bentuk lain yang saling menguntungkan salah satunya dalam wadah Kelompok Industri Peduli Lingkungan (KIPL).

3.2.7. Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Provinsi Lampung memiliki luas perairan laut $\pm 16.623,30 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai 1.105 km. Beragam jenis kegiatan yang berkembang di wilayah pesisir dan lautan Provinsi Lampung meliputi kegiatan perikanan laut, pariwisata, perhubungan, industri, pemukiman nelayan dan Hankam.

Dari 10



daerah

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung hanya 6 daerah yang memiliki wilayah pesisir yaitu: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung, sedangkan yang tidak memiliki wilayah pesisir adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 *juncto* Nomor 32 tahun 2004, Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sedangkan wilayah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sepertiga bagian dari wilayah provinsi. Mengacu pada perundangan tersebut, secara geografis Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai 1.105 km termasuk 69 pulau kecil dan besar (CRMP, 1998). Luas wilayah pesisir dan pantai diperkirakan + 16.625,3 km² laut yang merupakan wilayah kewenangan kabupaten/kota dan provinsi.

Kota Bandar Lampung sebagai cermin Provinsi Lampung mempunyai laut dan perbukitan dengan pemandangan yang indah merupakan potensi kekayaan dan anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan benar, menjadikan kota Bandar Lampung sebagai kota ecocity, di perlukan upaya dan tahapan tindakan dalam menata kawasan pemukiman, perbukitan dan laut yang selaras dengan lingkungan alami, potensi teluk lampung sebagai lumbung perikanan dapat dilakukan dengan memperbaiki/memperkecil upaya-upaya merusak dan mengelola pembuangan limbah dari sungai-sungai yang masuk ke Teluk Lampung, dan dilanjutkan dengan tindakan konservasi terumbu karang yang berkelanjutan. Wilayah pesisir merupakan peralihan ekosistem darat dan kelautan. Luas wilayah pesisir Lampung mencapai 440.010 Ha dan berada dalam wilayah 184 desa pesisir (Atlas Sumberdaya Pesisir, 1999). Secara garis besar wilayah pesisir tersebut adalah: Pesisir Barat (104.111 Ha dengan panjang garis pantai 210 km), Pesisir Timur (316.347 Ha dengan panjang garis pantai 270 km), Pesisir Teluk Lampung (48.630 Ha dengan panjang garis pantai 160 km termasuk Selat Sunda), dan Pesisir Teluk Semangka (62.250 Ha dengan panjang garis panjang 200 km), wilayah pesisir sebesar 531.428 Ha atau mencapai 15,02% dari seluruh wilayah Lampung.

Menurut Atlas Sumberdaya Pesisir (1999), secara umum kualitas perairan Teluk Lampung masih tergolong memenuhi syarat baku mutu untuk pariwisata dan rekreasi ataupun budidaya perikanan dan biota laut. Namun COD dan kandungan Cd sudah berada di atas batas yang diperbolehkan untuk tujuan kegiatan yang sama. Sedangkan oksigen terlarut (BOD), Cromium (Cr), Timbal (Plumbum- Pb) dan padatan tersuspensi (*Total Suspended Solid*) masih memenuhi syarat untuk tujuan rekreasi maupun budidaya di beberapa tempat, tetapi sudah berada di luar batas yang diperbolehkan di beberapa tempat yang lain. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perairan Teluk Lampung bagian dalam diklasifikasikan memiliki kualitas perairan yang cukup baik dengan taraf pencemaran ringan. Namun di beberapa lokasi seperti dekat dengan industri, TPI dan permukiman kumuh telah terjadi pencemaran (*degradasi*).

Berdasarkan hasil survei CRMP tahun 1998, kondisi hutan *mangrove* mengalami kerusakan yang cukup serius. Kerusakan paling serius terjadi diwilayah Pantai Timur Lampung. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, 90% *mangrove* di Pantai Timur yang semula hampir mencapai 20.000 Ha berubah fungsinya menjadi areal budidaya tambak dan pertanian sawah. Saat ini hanya tersisa lebih kurang 2.000 Ha *mangrove* di Pantai Timur dan cenderung semakin menipis sehingga berpotensi menyebabkan abrasi dan erosi pantai, terutama di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai dan sekitarnya. Sebagian besar (hampir 51.000 Ha) areal reklamasi Rawa Sragi, Rawa Jitu, dan Rawa Pitu juga telah berubah fungsinya menjadi areal perkebunan kelapa sawit, permukiman, dan pertambakan.

Pantai Barat hampir seluruhnya didominasi oleh pantai berpasir, hutan pantai dengan sisipan perkebunan rakyat dan dataran rendah dengan hutan meranti. Pantai sekitar Teluk (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) pada dasarnya mempunyai tipe yang sama, namun mengalami degradasi dan kohesi lebih besar karena dampak pembangunan dan kependudukan.

Keanekaragaman *mangrove* di Provinsi Lampung termasuk rendah umumnya didominasi oleh jenis api-api (*Avicennia alba*) ditunjang oleh buta-buta (*Bruguiera parviflora*) yang banyak dijumpai di daerah muara, agak ke hulu dijumpai nipah (*nypa*

fruticans), pedada (*Sonneratia caseolaris*) hal ini menunjukkan adanya pengaruh air tawar.

Mangrove yang hidup dan berkembang dengan baik akan banyak memberikan keuntungan, baik dalam mendukung keberlangsungan ekosistem perairan, mendukung perikanan laut, pasokan bahan bangunan, mencegah abrasi pantai, mencegah intrusi air laut serta menahan terjadinya sedimentasi.

Kawasan yang semula merupakan daerah kawasan mangrove telah berubah fungsi menjadi kawasan tambak udang, hal ini terutama dapat terlihat pada beberapa teluk dan muara sungai pada daerah Pantai Timur yang saat ini merupakan daerah tambak udang yang luas. Saat ini luasan mangrove di Pantai Timur hanya tersisa sekitar 2000 ha dari luas semula 20.000 ha.

Terumbu karang, padang lamun dan rumput laut dapat dijumpai di sepanjang daratan sempit sekitar pulau-pulau di bagian selatan dan barat. Pada umumnya terumbu karang di Lampung terdiri jenis *fringing reef* dengan luasan relatif 20 - 60 meter, pertumbuhan karang terhenti pada kedalaman 10-17 meter. Sejumlah terumbu karang tipe *patch reef* berkembang dengan baik dan dapat dijumpai di sepanjang sisi barat Teluk Lampung.

Pendataan awal menunjukkan terdapat sekitar 213 jenis karang keras yang berbeda di Selat Sunda antara lain di Kepulauan Krakatau, Teluk Lampung, Kalianda dan pulau-pulau di pesisir barat Pulau Jawa. Terumbu karang di Kepulauan Krakatau menunjukkan total 113 jenis karang besar, sekalipun keanekaragaman jenis rata-rata perlokasi agak rendah.

Hasil survey memperlihatkan bahwa hampir di semua lokasi, kecuali Teluk Lampung terumbu karang mempunyai penutupan karang batu yang rendah yaitu sekitar 0-10%, khususnya di kawasan Teluk Lampung penutupannya cukup besar yaitu mencapai 75 %. Pada bagian selatan Pantai Timur yaitu Pulau Rimau Balak, Pulau Mundu, Pulau Seram Besar, Pulau Seram Kecil, Pulau Kualu dan Pulau Prajurit, kisaran penutupan karang batu menunjukkan kisaran sangat rendah yaitu 0-10%.

Wilayah pesisir dan lautan Provinsi Lampung memiliki permasalahan yang cukup serius antara lain alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak udang yang menyebabkan hampir punahnya kawasan hutan mangrove dan rusaknya green belt kawasan Pantai Timur, hal ini merupakan penyebab utama terjadinya abrasi di sepanjang Pantai Timur.

Hutan rawa di Pantai Timur sudah banyak yang dikeringkan dan dikonversi menjadi sawah dan tambak dengan menebangi pohon-pohon yang ada sehingga fungsi rawannya telah berubah. Hutan rawa air payau merupakan lingkungan yang khas di Pantai Timur namun saat ini hanya sedikit tersisa dan dalam kondisi kritis. Dikhawatirkan hutan mangrove di Provinsi Lampung akan punah dalam beberapa tahun mendatang jika alih fungsi lahan mangrove menjadi areal tambak terus berlanjut dan tidak terkendali sehingga kemungkinan mangrove yang tersisa hanya terdapat di pulau-pulau wilayah teluk.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom merupakan masalah khusus yang terjadi di Teluk Lampung hal ini menyebabkan kerusakan terumbu karang yang pada umumnya merupakan kerusakan fisik, disamping kegiatan pengeboman, kegiatan penambangan batu karang untuk bahan bangunan dan hiasan juga menjadi ancaman kerusakan terumbu karang.

Upaya menanggulangi abrasi Pantai Timur telah dimulai dengan melakukan pembangunan beronjong penahan ombak di Kuala Penet, kemudian diikuti dengan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove oleh Dinas Kehutanan namun belum menghasilkan perbaikan vegetasi dan kurang melibatkan masyarakat setempat. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat turut menghambat program rehabilitasi mangrove, sehingga pertumbuhan vegetasi mangrove sangat rendah.

Menyadari kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bapedalda Provinsi Lampung mengembangkan program laut dan pesisir lestari atau yang disebut PROLESTARI.

Misi dari program PROLESTARI adalah melestarikan fungsi ekosistem wilayah laut

dan pesisir/pantai, sehingga dapat berhasil dan berdaya guna bagi keberlanjutan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendekatan pola kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perairan pantai dan ekosistem pesisir, dengan cara :

- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan air laut melalui pengurangan beban pencemaran masuk ;
- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan terumbu karang dan hutan bakau/mangrove;
- Meningkatkan sumberdaya kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam upaya pemantauan, pengendalian, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan laut dan ekosistem pesisir.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari program ini adalah:

- Terkendalnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove, terumbu karang, laut/perairan pantai.
- Berfungsinya green belt pantai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatnya kemanfaatan wilayah pesisir dan laut bagi kesejahteraan penciptaan lapangan kerja dan lapangan berusaha.

Ruang lingkup dalam pelaksanaan program ini dibagi dalam 3 (tiga) paket wilayah ekosistem, yaitu:

- Paket wilayah dengan lingkup kerja Kawasan Pantai Wisata, dapat disebut kegiatan Pantai Wisata Bersih;

- Paket wilayah dengan lingkup kerja kawasan pelabuhan, dapat disebut kegiatan Bandar Indah;
- Paket wilayah dengan lingkup kerja ekosistem terumbu karang dan mangrove, dapat disebut Teman Lestari; Paket Kegiatan Program Laut dan Pesisir Lestari (PROLESTARI) antara lain :
 - Pengembangan percontohan terumbu karang buatan dengan menggunakan ban bekas pada lokasi desa Way Muli Kabupaten Lampung Selatan.
 - Penertiban/pengamanan green belt (hutan mangrove).
 - Penetapan batas sempadan pantai dan tata ruangnya melalui penyusunan tata ruang wilayah pesisir dan pulau kecil.
 - Pengembangan percontohan perbaikan (pemulihan) hutan mangrove melalui pola kemitraan.
 - Pengendalian limbah cair dan padat industri, limbah domestik wilayah pantai dan sarana transportasi laut (kapal besar dan nelayan).
 - Pemantauan/pengendalian/penertiban kegiatan reklamasi pantai.

Uraian kegiatan Program Laut dan Pesisir Lestari (PROLESTARI) antara lain :

- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan (eksisting laut dan pesisir) dan sumber pencemar/perusakan pesisir dan laut, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :
 - Pengumpulan data kerusakan dan pencemaran baik melalui data primer maupun data sekunder, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain :
 - Dinas/Instansi Pemerintah terkait (Kehutanan, perikanan, perhubungan laut dan sebagainya).
 - Perguruan Tinggi (PSL) UNILA dan IPB.
 - Proyek-proyek penelitian

- LSM dan organisasi hobby lainnya seperti Persatuan Selani Lampung (Corona, Mahasiswa biologi).
- Pembuatan peta wilayah kerusakan dan pencemaran laut dan pesisir atau pengadaan peta dari Bakorsertanal.
- Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir dan nelayan, dengan kegiatan:
 - Pemasangan papan larangan dan himbauan ditempat-tempat wisata pantai, pelabuhan dan perkampungan pesisir (billboard).
 - Gerakan kebersihan massal bekerjasama dengan organisasi. Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar serta organisasi profesi (Persatuan selam dan biologi).
 - Pelatihan teknis pemantauan dan pemulihan kerusakan pesisir dan laut serta terumbu karang buatan.
 - Pemutaran film penerangan tentang konservasi alam, bekerjasama dengan instansi terkait, di lokasi perkampungan pesisir dan nelayan.
 - Penyebaran brosur, leaflet, selebaran, poster.
- Pengawasan kerusakan dan pencemaran pantai dan laut akibat limbah industri, domestik dan kapal/perahu nelayan, dengan cara :
 - Penandatanganan Surat Pernyataan PROLESTARI oleh penanggung jawab kegiatan diatas:
 - Industri oleh Pimpinan Perusahaan
 - Pemukiman oleh Kepala Desa/Lurah bersama Camat
 - Kapal dan nelayan oleh pemilik/Pimpinan Kapal.
 - Pengawasan/pemantauan lapangan secara periodik sesuai isi surat pernyataan.

- Pemulihan kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove melalui :
 - Penggalangan kemitraan dunia usaha dan masyarakat pantai/nelayan, dalam rangka pemberdayaan fungsi ekonominya.
 - Pembuatan percontohan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove (penghijauan/reboisasi hutan pantai).
 - Pembuatan percontohan pengendalian sampah pantai/laut (dengan cara penanaman rumput laut.
- Melakukan Audit lingkungan atas kegiatan reklamasi pantai dengan cara :
 - Penggalangan dana sharing dari pemilik beban reklamasi yang ada dalam sistem hamparan (Teluk Lampung atau wilayah pantai Kota Bandar Lampung).
 - Implementasi hasil audit lingkungan tersebut.

Dalam pelaksanaan program PROLESTARI melibatkan berbagai dinas/instansi dan kelembagaan serta pihak-pihak terkait, dibawah koordinasi BAPEDALDA Provinsi Lampung, antara lain :

1. Dinas/instansi Pemerintah, antara lain :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Dinas Kehutanan | - BAPEDALDA Prov. Lampung |
| - Dinas Kelautan dan Perikanan | - Pemerintah Kabupaten/Kota |
| - Dinas Pemukiman | - Serta instansi lainnya. |
| - Dinas Perhubungan | |

2. Organisasi Pemuda dan profesi lainnya/LSM, antara lain :

- Persatuan Selam (CORONA, Mahasiswa Biologi).
- Pecinta Alam (WALHI, WATALA, YMHI, ALAS, MITRA BENTALA,

KEHATI).

3. Dunia usaha (petambak, nelayan, real estate, industri produk, pariwisata).

Dengan pengembangan prinsip kemitraan, maka sumber dana yang diperlukan untuk pelaksanaan PROLASTRI, berasal dari :

1. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota (Instansi terkait).
2. Investor, sharing dunia usaha lain.
3. Revolving fund (dana berputar).
4. Dan sumber dana yang tidak mengikat.

Selanjutnya melihat tingkat urgensi yang tinggi terhadap pemulihan kembali hutan mangrove di wilayah Pantai Timur, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana bagi penyusunan rencana induk pengelolaan Pantai Timur yang akan mengatur seluruh kegiatan *stakeholder* dalam melakukan rehabilitasi dan pengelolaan kawasan Pantai Timur. Komitmen tersebut akan mengikat semua pihak melalui penerapan pola *bottom up* dengan melibatkan secara penuh peran aktif masyarakat yang selanjutnya akan diperkuat dengan aturan hukum daerah yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

3.2.8. Keanekaragaman Hayati

Salah satu tujuan pembangunan hutan selain untuk meningkatkan amenitas lingkungan juga dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Pesatnya pembangunan diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk dapat menyebabkan semakin berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna karena semakin sempitnya kawasan yang menjadi tempat kehidupan mereka.

Berbagai jenis flora dan fauna baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang masih banyak ditemukan di daerah Lampung perlu dilakukan upaya antisipasi agar populasi biota tersebut dapat dipertahankan dan dapat hidup di alam bebas.

Penurunan berbagai jenis flora dan fauna yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya perburuan liar dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur ketentuan terhadap berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi atau kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap jenis satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi.

Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan kelestarian keanekaragaman flora dan fauna dilakukan melalui penetapan kawasan-kawasan cagar alam, hutan lindung serta upaya penghijauan dan reboisasi yang memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan keanekaragaman hayati.

Vegetasi utama yang terjadi terdapat di Taman Nasional adalah Hutan Hujan Tropika di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan. Pada hutan dataran tinggi dan dataran rendah umumnya didominasi oleh tumbuhan marga *Lauranceae*, *Dilleniaceae*, *Dipterocarpaceae*, *Myrtaceae* dan *Fagaceae*. Di hutan pantai barat terdapat bunga bangkai (*Amorphophalus sp*) sebagai bunga tertinggi di dunia dan bunga Raflesia (*Rafflesia Arnoldi*) yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia.

Vegetasi pantai timur umumnya didominasi oleh *Terminalia catappa*, *Hibiscus sp*, *Barringtonia asiatica*, *Calophyllum inophyllum*, *Casuarina equisetifolia*, *Ficus septica*, dan *Pandanus tectorius*. Tipe vegetasi lain berupa padang alang-alang (*Imperata cylindrica*) dengan luas sekitar 50 Ha di Tanjung Blimbing.

Wilayah Taman Nasional bagian barat yang berbatasan dengan pemukiman penduduk terdapat zona penyangga berupa hutan Damar (*Shorea javanica*). Resin yang dihasilkan dari tanaman ini memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi masyarakat sekitarnya, dan Hutan Damar ini dijaga kelestariannya oleh segenap masyarakat secara turun temurun dengan pola pengelolaan yang lebih dikenal dengan "Repong Damar".

Wilayah Taman Nasional Way Kambas di bagian timur Provinsi Lampung yang merupakan dataran rendah memiliki vegetasi hutan pantai, mangrove, hutan gambut dan rawa pasang surut, rawa air tawar serta hutan dataran rendah. Pantai Timur yang

berpasir ditumbuhi oleh cemara laut (*Casuarina equisetolia*) warn, ketapang dan pandan berduri.

Vegetasi hutan mangrove yang terdapat di muara sungai didominasi oleh api-api, buta-buta, semakin ke hulu dijumpai nipah dan nibung serta berbagai jenis palem di antaranya palem merah yang bercampur dengan tumbuhan hutan air tawar dengan dominasi tumbuhannya gelam dan rengas.

Pada areal yang lebih tinggi dan relatif berupa rawa terdapat jenis pohon perwakilan dari tipe vegetasi hutan hujan tropika daratan seperti merawan, meranti, jabon, minyak, puspa, dan sempur berupa hutan sekunder sebagai sisa tebangan dari HPH yang berlangsung antara tahun 1968 sampai dengan tahun 1974.

Flora di Taman Nasional Way Kambas terdiri dari berbagai jenis dari berbagai tipe vegetasi antara lain :

- Tipe vegetasi hutan dataran rendah, di daerah hulu Way Kambas, jenis hutan yang ada antara lain : Meranti (*Shorea sp*), Salam (*Eugenia polyantha*), Merawan (*Hopea sp*), Minyak (*Dipterocarpus retusus*), Merbau (*Intia palembanica*), dan lain-lain.
- Tipe vegetasi hutan rawa ditumbuhi oleh : Nibun (*Oncosperma tigilaria*), Gelam (*Melaleuca spp*), Rengas (*Gluta renghas*), Merbau (*Inssia palembanica*), Nibung (*Oncosperma tigilaria*), Rotan (*Calamus sp*), Pandan-pandanan (*Pandanus sp*), Palem Merah (*Cyrtostachys lakka*), dan jenis-jenis rumput rawa.
- Tipe vegetasi hutan mangrove didominasi oleh jenis pohon Bakau (*Avicennia spp*), (*Rhizophora spp*), dan Nipah (*Nipah fruticans sp*).
- Tipe vegetasi hutan pantai didominasi oleh Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*) dan Ketapang (*Terminalia catappa*).
- Di beberapa tempat sepanjang Way Kambas dapat dijumpai sejenis *Liana* yang

- mempunyai bunga seperti bunga, Kantong Semar, (*Nepenthes*).
- Di hutan-hutan sekunder dapat dijumpai jenis-jenis Meranti (*Shorea sp*), Sempur (*Dillenia excelsa*), Puspa (*Shima wallichii*), Jabon (*Anthocephalus chinensis*) dan Rengas (*Gluta Rengas*).
 - Di daerah bekas pemukiman yang terletak di bagian tepi kawasan (*zona penyangga*), misalnya di Karang Sari terdapat tanaman reboisasi Sonobrit (*Dalbergia eusetifolia*), Lamtorogung (*Leuacena leucocephala*), Kaliandra (*Caliandra sp*), dan Jambu monyet (*Anacardium occidentale*).

Di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terletak di bagian barat Provinsi Lampung dari berbagai laporan yang ada diketahui bahwa kawasan ini dihuni oleh berbagai jenis mamalia darat, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

Di kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan berbagai tipe vegetasi yang ada telah mendukung kelangsungan hidup satwa liar yang ada didalamnya. Taman Nasional Way kambas dihuni tidak kurang dari 286 jenis burung dan hewan mamalia, baik sebagai hewan yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dan sebagai hewan langka. Salah satu jenis burung air endemik Sumatera dan paling langka adalah entok/itik rimba (*Cairina scutulata*) terdapat dalam populasi terbesar hanya di Taman Nasional Way Kambas. Perairan Taman Nasional Way Kambas juga dihuni oleh dua jenis buaya yaitu buaya muara dan buaya ikan yang tergolong jenis buaya yang terancam punah, selain itu terdapat juga biawak dan kura-kura air tawar serta berbagai jenis ikan.

Fauna di Taman Nasional Way Kambas berdasarkan Zoogeografi termasuk kedalam 'oriental subregion' dan 'sundaic subregion' yang kaya akan jenis satwa liar. Beberapa di antara satwa liar yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas adalah :

- Mamalia, Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatrensis*), Badak Sumatra (*dicerorhinus sumatrensis*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa (*Cervus unicolor*), Kijang (*Muntiacus muntjac*), Napu (*Tragulus napu*), Babi Hutan (*Sus scrofa*). Jenis mamalia

lain yang ada, di antaranya; Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Harimau Sumatera (*Phantaera tigris sumatrae*), Anjing Hutan (*cuan alpinus*), Kucing Emas (*Felis temminchii*), Kucing Bulu (*Fells marmorata*) dan jenis-jenis musang.

- Primata, terdapat 6 (enam) jenis primata, yaitu Siamang (*Sympholangus syndactylhs*), Owa (*Hylobates moloch*), Beruk (*Macacanemestrina*), Kera Ekor Panjang (*Macaco fascicularis*), Lutung (*Presbytis cristata*), dan Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*).
- Burung (Aves), terdapat $\pm$ 286 jenis burung, di antaranya ; Rangkong (*Bucerotidae*), Kuntul Putih (*Egreta sp*), Beo (*gracula religiosa*), Ayam Hutan (*Gallus gallus*) Pecuk Ular (*Anchinga melanogaster*) dan Raja Udang (*Halcyon funebris*). Terdapat juga jenis penelitian yaitu bebek hutan atau itik liar (*Cairina scutulata*).
- Jenis Amphibia, reptilia dan Ikan (*Pisces*). Dari Reptilia terdapat; Buaya Sinyulong, Buaya Muara, Kura-kura Sisik, dan berbagai jenis ular. Sedangkan jenis ikan yang terdapat di daerah ini adalah Ikan Baung yang sangat terkenal sebagai hidangan khas Lampung.

Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau berada di Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas perairan cagar alam laut lebih kurang 13.735 ha. Vegetasi umumnya terdiri dari hutan pantai yang didominasi oleh waru laut, cemara Sumatera dan ketapang dengan jenis fauna pada terancam punah selain itu terdapat juga biawak dan kura-kura air tawar serta berbagai jenis ikan.

Fauna di Taman Nasional Way Kambas berdasarkan Zoogeografi termasuk kedalam 'oriental subregion' dan 'sundaic subregion' yang kaya akan jenis satwa liar. Beberapa di antara satwa liar yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas adalah :

- Mamalia, Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatrensis*), Badak Sumatra (*dicerorhinus sumatrensis*). Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa (*Cervus unicolor*), Kijang (*Muntiacus muntjac*), Napu (*Tragulus napu*), Babi Hutan (*Sus scrofa*). Jenis mamalia lain yang ada, di antaranya; Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Harimau Sumatera (*Phantaeratigris sumatrae*), Anjing Hutan (*cuan alpinus*), Kucing Emas (*Felis temminchii*), Kucing Bulu (*Felis marmorata*) dan jenis musang.

- Primata, terdapat 6 (enam) jenis primata, yaitu Siamang (*Symphalangus syndactylus*), Owa (*Hylobates moloch*), Beruk (*Macacanemestrina*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Presbytis cristata*), dan Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*).
- Burung (Aves), terdapat ± 286 jenis burung, di antaranya ; Rangkong (*Bucerotidae*), Kuntul Putih (*Egreta sp*), Beo (*gracula religiosa*), Ayam Hutan (*Gallus gallus*) Pecuk Ular (*Anchinga melanogaster*) dan Raja Udang (*Halcyon funebris*). Terdapat juga jenis penelitian yaitu bebek hutan atau itik liar (*Cairina scutulata*).

Jenis Amphibia, reptilia dan Ikan (*Pisces*). Dari Reptilia terdapat; Buaya Sinyulong, Buaya Muara, Kura-kura Sisik, dan berbagai jenis ular. Sedangkan jenis ikan yang terdapat di daerah ini adalah Ikan Baung yang sangat terkenal sebagai hidangan khas Lampung.

3.3. Sumberdaya Buatan

3.3.1. Perekonomian Daerah Lampung

Provinsi Lampung merupakan daerah agraris, kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Pada saat terjadi krisis ekonomi, kondisi sektor pertanian terbelah menjadi dua. Daerah-daerah pertanian yang tanaman/komoditas utamanya tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor seperti lada, kopi, dan produk perikanan, tidak merasakan sulitnya pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan karena produk-produk tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, petani dengan komoditas utama padi dan singkong sangat merasakan dampak tersebut mengingat naiknya berbagai harga sarana produksi pertanian yang tidak diimbangi dengan harga jual produk yang dihasilkan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB

yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat tergantung kepada potensi sumberdaya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Dalam penyajiannya PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, di mana saat ini digunakan tahun dasar 1993. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perekonomian daerah seperti yang digambarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hakekatnya adalah serangkaian kebijakan dan urutan pelaksanaan prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Perekonomian suatu daerah digambarkan pada label Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibagi atas lapangan usaha atau sektor/sub sektor ekonomi. PDRB terdiri dari 9 sektor ekonomi yaitu:

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalan
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas, dan air minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Transportasi dan komunikasi
8. Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Gejolak krisis ekonomi secara nasional sejak tahun 1998 masih berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Daerah Lampung. Tinggi suku bunga bank menyebabkan investasi terhadap sektor-sektor produktif sangat rendah atau kalau mungkin dapat dikatakan hampir tidak ada. Selain itu faktor gejolak politik sangat mempengaruhi gairah iklim investasi di Daerah Lampung akibat banyaknya aksi demonstrasi dan penjarahan yang sangat mengganggu aktivitas dan kegiatan serta kenyamanan berusaha.

Pada tahun 2005 perekonomian Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Indikator pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan pada kondisi perekonomian Lampung secara keseluruhan. Pemulihan perekonomian Lampung ditunjang oleh kenyataan bahwa hampir semua sektor telah mengalami pertumbuhan positif. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang sangat berarti seperti sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5,97 persen), Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,66 persen) dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (5,26 persen). Indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung seperti yang terlihat pada tabel SDB-24 memberikan gambaran fluktuasi pada beberapa sektor ekonomi, kondisi ini menjadi asumsi dan dasar harapan semakin baiknya kondisi ekonomi pada tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2004 sebesar 4,98% (atas harga konstan 1993). Perekonomian Lampung didominasi oleh 4 (empat) sektor kegiatan ekonomi, yakni sektor Pertanian, sektor Perdagangan/Hotel/Restoran, sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa-jasa. Hal ini terlihat dari kontribusi masing-masing sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung. Jika dilihat dari kondisi setahun terakhir, maka pada tahun 2005 kontribusinya adalah 36,99 persen; 14,64 persen; 12,93 persen; dan 11,29 persen.

Apabila PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka akan diperoleh PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai PDRB per penduduk, sedangkan PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan 2000 dapat menunjukkan besarnya PDRB riil Per Kapita penduduk. Selama kurun waktu 2002 - 2005 PDRB Per Kapita Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2002 PDRB Per Kapita

atas dasar harga berlaku sebesar 4,270 juta rupiah, naik menjadi 5,716 juta rupiah pada tahun 2005.

3.3.2. Sektor Pertanian Dalam Arti Luas

Pertanian Tanaman Pangan

Provinsi Lampung merupakan daerah pemasok produksi bahan pangan ke Jakarta. Sebagai daerah agraris hampir 63% luas Provinsi Lampung merupakan daerah pertanian dalam arti luas.

Provinsi Lampung merupakan daerah yang memasok hasil produksi tanaman pangan ke Jakarta, luas panen tanaman pangan seperti yang tergambar pada Tabel SDB-3 tahun 2005 sebesar 1.177.293 ha. Dari luasan tersebut luas panen terbesar adalah padi sawah yaitu 426.192 ha, disusul jagung seluas 411.629 ha. Kedua komoditas pertanian tanaman pangan ini mendominasi lebih dari 65% luas pertanian tanaman pangan di Provinsi Lampung dengan sentra produksi terbesar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Utara.

Produksi padi di Provinsi Lampung mengalami kenaikan dari 2.091.996 ton pada tahun 2004 menjadi 2.124.144 ton pada tahun 2005 atau sekitar 1,54 persen dengan sentra produksi padi terbesar di kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 467.984 ton atau 22,03 persen dari total produksi padi di Provinsi Lampung.

Produksi jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kacang hijau di Provinsi Lampung pada tahun 2005 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2004, sedangkan produksi ubi jalar dan kedelai mengalami penurunan.

Beberapa komoditas yang menjadi andalan ekspor Provinsi Lampung selain pisang antara lain durian, nanas, sawo, belimbing, dan nangka/ cempedak. Komoditas tersebut sebagian besar merupakan bahan olahan yang dikalengkan seperti nanas dan belimbing. Pengembangan produksi komoditas buah-buahan unggulan seperti durian, nanas, mangga, terus dilakukan melalui perbaikan teknik penanaman dan

pengembangan/ perluasan lahan khususnya pada wilayah-wilayah produktif di bagian selatan Provinsi Lampung.

Demikian pula komoditas lainnya tetap dipertahankan khususnya duku/langsat yang menjadi primadona daerah Lampung. Alih fungsi lahan khususnya beberapa komoditas unggulan tersebut sebaiknya dihindarkan, mengingat semakin sempitnya lahan produktif. Dengan demikian pelestarian ekosistem tumbuhan lahan spesies daerah akan terjaga dengan baik.

Perkebunan

Subsektor perkebunan menyumbang pertumbuhan terhadap PDRB relatif sangat besar. Pertumbuhan demikian memberikan sumbangan yang signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan Daerah Lampung secara keseluruhan. Subsektor perkebunan dalam beberapa tahun terakhir merupakan sektor penyokong yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan mampu bertahan pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tingginya kontribusi ini disebabkan tingginya permintaan ekspor hasil perkebunan seperti kopi, dan hasil perkebunan lainnya.

Perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Luas perkebunan besar tahun 2005. Komoditas yang ditanam oleh perkebunan besar terdiri dari tanaman berumur panjang seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kakao dan teh serta tanaman berumur pendek seperti tebu. Perkebunan besar di Provinsi Lampung didominasi oleh perkebunan tebu yaitu 91.768 ha, kelapa sawit yaitu 60.467 ha, dan karet seluas 96.267 ha. Sedangkan jumlah produksi tahun 2005, didominasi oleh kelapa sawit dan tebu.

Produksi perkebunan rakyat terdiri dari (1) tanaman berumur panjang dan (2) tanaman berumur pendek. Produksi tanaman yang berumur panjang terdiri dari karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, lada, serta berbagai komoditas lainnya, sedangkan tanaman yang berumur pendek didominasi oleh tebu, jahe, dan lengkuas serta berbagai

komoditas lainnya. Komoditas yang memiliki luas areal terbesar adalah kopi kemudian disusul kelapa dalam dan kelapa hibrida.

Produksi tanaman berumur panjang terbesar adalah kelapa dalam, dan kemudian disusul oleh kopi, lada dan karet. Produksi perkebunan yang tanamannya berumur panjang yang terbesar diekspor adalah kopi, disusul dengan lada dan karet. Tanaman yang berumur pendek yang diekspor hanya jahe.

Komoditas kopi yang menjadi andalan daerah Lampung selain sudah diproses menjadi kopi instan dan kopi bubuk juga diekspor kopi mentah. Peningkatan areal perkebunan kopi rakyat yang cukup tinggi disinyalir karena perambahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dari hasil investigasi lapangan banyak lokasi perambahan dengan kelerengan > 10 % tersebut ditanami kopi. Bukan tidak mungkin berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan.

Produksi Komoditas Kehutanan

Produksi komersial komoditas kehutanan tahun 2005 Provinsi Lampung didominasi oleh jenis kayu Campuran, Sengon, Meranti, Gamelina, jati serta kayu Mahoni/indah, yang merupakan kayu bulat. Sedangkan hasil hutan lain adalah Arang, selanjutnya Damar Mata Kucing, Damar Batu, Rotan Manau dan Rotan Kecil.

Kabupaten Lampung Barat satu-satunya sentra produksi damar mata kucing yang sering dikenal dengan istilah, Repong Damar (kebun damar), Repong damar ini dikelola dengan cara turun menurun, di mana pada tahun 1997 petani damar ini memperoleh penghargaan Kalpataru atas kegiatan perkebunan dengan pertimbangan konservasi wilayah.

Perikanan

Produksi perikanan laut tahun 2005 seperti pada tabel SDB-23 mencapai 145.828 ton. Nilai produksi komersial perikanan tahun 2005 sebesar Rp 1.026,974 milyar .

Produksi perikanan laut yang berasal dari Teluk Lampung semakin menurun dengan

semakin rusak ekosistem terumbu karang akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Kebanyakan terumbu karang di Lampung adalah jenis "*fringing reefs*" dengan luasan 20 - 60 meter mengalami kerusakan 60 - 75% selain karena pemboman kerusakan tersebut juga akibat erosi, sedimentasi, dan penambangan karang untuk bahan bangunan.

Peternakan

Peternakan terdiri dari ternak besar dan kecil serta unggas. Populasi ternak sapi, kambing dan domba pada tahun 2005 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2004, sedangkan ternak kerbau dan babi mengalami penurunan. Populasi unggas (ayam kampung, ayam ras petelur) pada tahun 2005 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2004, kecuali ayam pedaging dan itik.

Jenis ternak di Provinsi Lampung tahun 2005 seperti pada Tabel SDB-25 meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas. Populasi ternak didominasi oleh ternak kambing 927.736 ekor dan sapi 417.129 ekor, adapun populasi ternak kerbau 49.219 ekor.

Produksi peternakan unggas menunjukkan bahwa pemasok daging terbesar adalah ayam ras pedaging dengan jumlah populasi lebih dari 21,747 juta ekor, kemudian disusul oleh ayam kampung dengan populasi lebih dari 13,94 juta ekor.

Dari kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian (dalam arti luas) cukup mampu bertahan dalam suasana krisis ekonomi dan merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi daerah Lampung secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Lampung selayaknya dapat lebih mengarah pada peningkatan dan kemajuan sektor pertanian, mengingat sektor ini paling banyak digeluti oleh masyarakat Lampung yang sebagian besar petani.

Kebijakan keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani sebagai subjek tidak terlepas dari stratifikasi sosial ekonomi mereka. Faktor determinan yang menentukan operasionalisasi keberpihakan diantaranya pola keberpihakan lahan garap, suatu

indikator yang selanjutnya mengklasifikasikan skala keberpihakan sesuai dengan strata sosial ekonomi petani yaitu petani pemilik, petani penggarap, dan buruh tani.

Di lain pihak, sumber-sumber pertumbuhan lain seperti tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi yang informal dan mandiri, yang intinya bersumber pada peranserta dan kemampuan masyarakat juga sangat dibutuhkan kerana kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak dapat hanya dengan mengandalkan pada ketersediaan investasi modal dan ketersediaan tenaga kerja saja. Pembangunan ekonomi di era reformasi telah mulai mengarahkan pada arah yang benar, yaitu pembangunan untuk rakyat dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan rakyat sebagai pelaku utama yang mandiri dan tangguh.

3.3.3. Pencemaran Udara

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik, pusat-pusat industri dan transportasi, kualitas udara mengalami perubahan.

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (PP nomor 41 tahun 1999).

Kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan global, karena udara telah tercemar akibat dari berbagai aktivitas manusia dan proses alam. Berbagai macam gas yang ada di udara adalah merupakan selimut permukaan bumi yang sangat labil kondisinya karena sifatnya yang sangat mudah dipengaruhi oleh cuaca dan iklim.

Pencemaran udara secara alamiah diakibatkan oleh letusan gunung berapi, serbuk tepungsari, spora yang terbawa angin, kebakaran hutan, serta debu akibat erosi dan tanah longsor. Sedangkan pencemaran udara akibat aktivitas manusia antara lain adalah adanya pembangunan industri-industri, pabrik, lalu lintas kendaraan yang

makin padat yang semua makin menambah aneka macam kadar zat pencemar udara.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, maka Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan aktivitas pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) menggunakan Baku Mutu Udara Ambien Nasional (PP No. 41 Tahun 1999).

Sumber Pencemaran dan Beban Pencemaran Udara

Sumber pencemaran udara di Provinsi Lampung secara umum terdiri dari 2 (dua) sumber utama pencemaran yaitu dari sumber utama yang tidak bergerak dan sumber utama yang bergerak.

Sumber utama yang tidak bergerak

Kegiatan industri pengolahan adalah proses aktivitas industri dengan menggunakan teknologi guna menghasilkan barang. Disamping proses produksi yang merupakan sumber pencemaran, kegiatan pembakaran bahan bakar yang dipergunakan untuk proses utilitas industri juga merupakan sumber pencemaran udara.

Di Provinsi Lampung, kegiatan-kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran udara dalam proses produksinya antara lain; industri monosodium glutamat (MSG), industri arang aktif, industri pakan ternak, industri sodium glutamat, industri pakan udang, industri pemecah batu, industri gula, industri minyak sawit (CPO), industri tapioka, dan industri pengalengan nanas.

Menurut hasil analisa laboratorium kualitas udara dari lokasi industri yang telah dilakukan pengukuran kualitas udara menunjukkan adanya kualitas udara yang berada di bawah ambang batas/baku mutu.

Dari hasil pengukuran kualitas udara pada beberapa pabrik secara keseluruhan dengan parameter yang digunakan menunjukkan bahwa kadar pencemaran udara masih di bawah ambang batas kecuali beberapa pabrik/industri yang melebihi

ambang batas/baku mutu. Sebagai upaya antisipasi dilakukan berbagai upaya antara lain melakukan penyiraman pada areal sekitar pada musim kemarau sedangkan pada musim hujan kualitas udara pada lokasi tersebut masih dalam ambang batas baku mutu udara.

Sumber Pencemaran Bergerak

Salah satu dampak negatif dari kegiatan sektor transportasi dan angkutan terhadap lingkungan hidup adalah terjadinya pencemaran udara. Sumber pencemar utama dari sumber bergerak adalah kendaraan bermotor dengan polutan berupa karbon monoksida sebesar lebih kurang 60% dan polutan berupa hidrokarbon berkisar lebih kurang 15%.

Emisi kendaraan bermotor sangat potensial menimbulkan pencemaran udara. Penggunaan bensin bertimbal (Pb) mempunyai andil yang besar dalam menurunkan kualitas udara terutama akibat komponen timbal (Pb) yang terlepas ke udara bebas. Selain itu emisi kendaraan bermotor juga mengandung CO dan HC yang berperan dalam menurunkan kualitas udara.

Berdasarkan hasil analisa kualitas udara di kota Bandar Lampung yang diambil berdasarkan sampel pengukurannya di Terminal Panjang, Terminal Pasar Bawah dan Terminal Rajabasa yang lokasinya berdekatan dengan Pusat Kota, Pelabuhan Laut, jalan lingkar luar untuk kendaraan berat lintas Sumatera, perlintasan kereta api pengangkut batubara ke Pelabuhan Tarahan serta merupakan terminal dalam/antar kota dan antar Provinsi serta terminal terbesar di Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang masih di bawah batas toleransi kecuali parameter Carbon Monoksida (CO) akibat pembakaran yang tidak sempurna dan Debu (Dust), namun secara umum kualitas udara di Bandar Lampung masih relatif baik.

Sebagai upaya pengendalian pencemaran akibat emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut dilakukan pembatasan masa berlaku izin trayek (izin operasional) serta rekomendasi perawatan kendaraan pada saat pemberian/perpanjangan izin KIR (layak jalan) setiap 6 (enam bulan) sekali oleh institusi berwenang.

Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian pencemaran udara adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menurunkan jumlah dan kadar pencemaran udara dari sumber. Secara umum kondisi kualitas udara di Provinsi Lampung masih relatif baik, meskipun demikian upaya pencegahan dan mempertahankan kondisi tersebut melalui kegiatan monitoring secara berkala terhadap industri-industri potensi sumber pencemar tetap dilakukan, dikaitkan pula dengan telah adanya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660.33/0298/ Bapedalda/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pemeriksaan Mutu/ Kualitas Udara di Daerah.

Kegiatan pengendalian pencemaran udara juga dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi peraturan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan dunia usaha, terutama pada industri-industri yang dalam proses produksinya berpotensi besar menyebabkan pencemaran udara.

Upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang melibatkan seluruh komponen masyarakat merupakan langkah nyata untuk terlaksananya program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh berbagai pihak tersebut antara lain :

a. Peran Pemerintah Daerah

- Pengendalian pada tahap perencanaan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengendalian pada tahap pelaksanaan operasional, seperti pemasangan alat hisap debu dan penetapan emisi standar, baik yang bergerak maupun tidak.
- Pemantauan dan Pengawasan terhadap emisi atau ambien dan upaya pengendalian oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan
- Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Hutan Kota serta

penyelamatan jalur hijau di wilayah perkotaan sebagai paru-paru kota.

- Penertiban kendaraan bermotor yang tidak layak jalan terutama kendaraan angkutan kota dengan pembatasan ijin trayek dan wajib uji kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah.
- Pemantauan secara berkala dan pengujian kualitas udara pada beberapa titik yang rawan polusi akibat kepadatan lalu lintas sebagai bahan evaluasi terhadap kemungkinan dilakukannya pola penanganan dan penanggulangan bila terjadi penyimpangan dari ambang batas yang ditoleransi.
- Pemberian sanksi hukum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Peranserta masyarakat dan mitra lingkungan

- Mendukung program pemerintah melalui peransertanya dalam langkah-langkah sosialisasi dilingkungannya dengan pemahaman dan ketaatannya terhadap kelestarian lingkungan.
- Mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah kota.

3.3.4. Pencemaran Air

Salah satu sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menopang kelangsungan hidup adalah air. Air yang sangat terbatas ini pada umumnya oleh manusia digunakan untuk kebutuhan domestik, pembangkit tenaga listrik, kelangsungan proses industri, kegiatan perikanan, pertanian, peternakan dan lain-lain. Secara alami sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat dipengaruhi dan mempunyai daya regenerasi mengikuti suatu daur ulang yang disebut siklus hidrologi (Suryani, 1987). Keterbatasan air sangat dipengaruhi oleh keseimbangan yang dapat mempengaruhi daur hidrologi tersebut yaitu terganggunya kehidupan ekosistem yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan.

Dengan demikian air merupakan salah satu sumberdaya alam yang mutlak dibutuhkan bagi kehidupan manusia di dunia, karena sebagai bahan baku air bersih bagi kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup lainnya.

Jenis Pencemaran Air

Pencemaran Air (PP, Nomor 20 tahun 1990) adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, atau proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sumber Pencemaran Air

Pencemaran air pada umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Besar kecilnya pencemaran akan tergantung dari jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kesungai, baik limbah padat maupun cair.

Berdasarkan jenis kegiatan maka sumber pencemaran air dibedakan menjadi :

- a. Effluent industri pengolahan; effluent adalah pencurahan limbah cair yang masuk kedalam air bersumber dari pembuangan sisa produksi, lahan pertanian, peternakan dan kegiatan domestik.
- b. Sumber domestik/buangan rumah tangga; menurut peraturan Menteri Kesehatan, yang dimaksud dengan buangan rumah tangga adalah buangan yang berasal bukan dari industri melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit.

Upaya Pengendalian Pencemaran Air

Upaya penurunan beban limbah khususnya dan kegiatan industri pengolahan

dilakukan melalui intensitas pemantauan kualitas lingkungan (sungai), penataan baku mutu limbah cair daerah (BMLCD), penegakan hukum, peningkatan peranserta masyarakat serta Program Kali Bersih (Prokasih) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1989/1990 yang telah berhasil menurunkan beban limbah total pada DAS prioritas prokasih selama 10 tahun terakhir dari beban limbah cair menurun sebesar 90%, meskipun demikian beban aktual tersebut masih cukup tinggi. (Tabel SDB-21).

Bapedalda Provinsi Lampung melakukan pula upaya pengendalian pencemaran air yang berbasis masyarakat melalui sistem peringatan dini (*early warning system*) dengan menempatkan keramba apung sebagai *bio indicator* pada sungai-sungai yang ada di Provinsi Lampung, diantaranya yang baru saja dilakukan di DAS Seputih desa Palas Ilir Kabupaten Lampung Selatan.

Disamping itu pengendalian pencemaran dilakukan pula dengan pembentukan Kelompok Industri Peduli Lingkungan (KIPL) yang telah menandatangani pernyataan kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga lingkungan DAS dalam wilayah industrinya.

Kemudian upaya pengendalian pencemaran air dilakukan pula prinsip "*Reward and Punishment* " dimana bagi kegiatan usaha yang melalaikan kewajibannya dan beban limbahnya melampaui baku mutu akan dikenakan sanksi penegakan hukum sesuai dengan tahapan yang ditentukan meliputi teguran, peringatan, sanksi administrasi berupa penutupan saluran limbah atau ditingkatkan ke arah penyidikan oleh kepolisian. Selanjutnya bagi kegiatan usaha yang telah memenuhi kewajibannya dalam waktu periode tertentu akan diberikan penghargaan.

Upaya-upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran secara berkala melalui kewajiban dari setiap penanggungjawab kegiatan untuk memeriksakan limbah cairnya serta melaksanakan swapantau, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL kegiatan wajib Amdal serta UKL/UPL, upaya peningkatan perbaikan sungai, serta sosialisasi

kebersihan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat.

3.3.5. Limbah Padat

Limbah padat dapat didefinisikan sebagai suatu hasil buangan berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari proses industri pengolahan maupun non industri pengolahan.

Sumber Limbah Padat

Di Provinsi Lampung limbah padat yang ada bersumber dari industri pengolahan dan non industri pengolahan.

Limbah Padat dari Industri Pengolahan

Berbagai industri pengelolaan yang menghasilkan limbah padat antara lain adalah :

- a. Industri tapioka mengeluarkan limbah padat berupa ampas singkong berupa lumpur/bubur (onggok singkong).
- b. Industri gula mengeluarkan limbah padat berupa ampas tebu, pucuk tebu, dan blotong.
- c. Industri pengalengan nanas mengeluarkan limbah padat berupa kulit nanas, bonggol batang, dan bonggol bagian tengah dari buah nanas.
- d. Industri minyak sawit (CPO) mengeluarkan limbah padat berupa kulit biji, batok kelapa, dan ampas.
- e. Industri rumah potong hewan mengeluarkan limbah padat berupa jeroan, kaki, dan tulang-tulang.
- f. Industri kopi mengeluarkan limbah padat berupa kulit biji (hasil sortasi) dan ampas.

- g. Industri penyamakan kulit mengeluarkan limbah padat berupa kulit bulu dari proses penyamakan dengan krum.
- h. Industri kertas (dari bahan bambu) mengeluarkan limbah padat berupa potongan bambu dan residu dari bubur kertas.
- i. Industri makanan/minuman (dari buah kelapa) mengeluarkan limbah padat berupa kulit kelapa (batok dan sabut kelapa).

Limbah padat dari industri pengolahan ini hanya sebagian kecil yang diproses melalui daur ulang menjadi bahan lain seperti pada industri pengalengan nanas (kulit nanasnya diproses untuk pakan ternak) demikian juga industri makanan/minuman dari buah kelapa, limbahnya berupa batok kelapa diproses menjadi arang aktif.

Limbah Padat non Industri Pengolahan

Sumber limbah padat dari industri non pengolahan yaitu limbah padat yang berasal dari berbagai sektor kegiatan antara lain limbah padat dari sektor domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta dari tempat-tempat umum.

Limbah padat dan sektor domestik ini banyak dipengaruhi oleh asal-usul sumber limbah padat yang ada terutama di daerah perkotaan berasal dari kegiatan domestik (rumah tangga). Jumlah limbah padat non-industri yang diproduksi di Provinsi Lampung telah mendekati angka 8.000 m³/hari, dengan penghasil terbesar adalah wilayah Kota Bandar Lampung.

Upaya Pengendalian dan Penanggulangan Limbah Padat

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencemaran, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya pengendalian limbah padat melalui beberapa langkah kegiatan antara lain menerapkan suatu ketentuan yang telah diberlakukan sesuai dengan Tata

Ruang Daerah dan ketentuan yang berlaku, maka setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka semua jenis kegiatan yang berdampak penting disyaratkan untuk menyusun AMDAL, UKL/UPL.

Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disusun tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perizinan yang dimohonkan dan sesuai dengan batas kewenangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomo 32 tahun 2004 maupun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Langkah awal kegiatan ini telah dilakukan melalui sosialisasi Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya pencemaran.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menanggulangi limbah padat yang terjadi akibat dari limbah padat industri pengolahan maupun non industri pengolahan antara lain sebagai berikut :

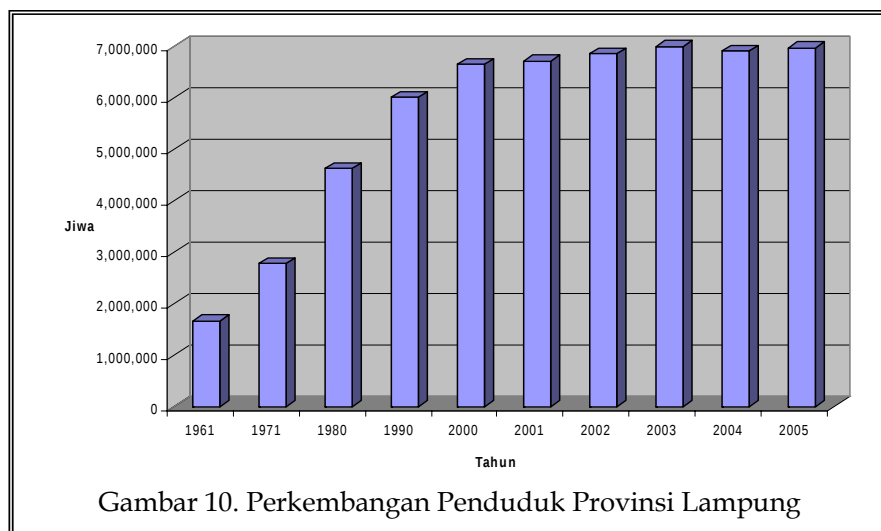
1. Proses daur ulang, proses ini dilakukan bagi limbah padat yang dapat dimanfaatkan kembali baik oleh pengusaha, pekerja, maupun oleh masyarakat setempat.
2. Pelatihan dan pembinaan peranserta masyarakat dalam upaya daur ulang sampah melalui komposting di desa Sumber Rejo Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung.
3. Proses pembuangan akhir, proses ini dilakukan oleh pengusaha dilingkungan usaha dengan proses tertentu maupun dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Limbah padat non industri pengolahan umumnya dihasilkan dari sampah rumah tangga dari berbagai tingkat pendapatan dan kepadatan pemukiman di kota pada umumnya.

3.4. Sumberdaya Manusia

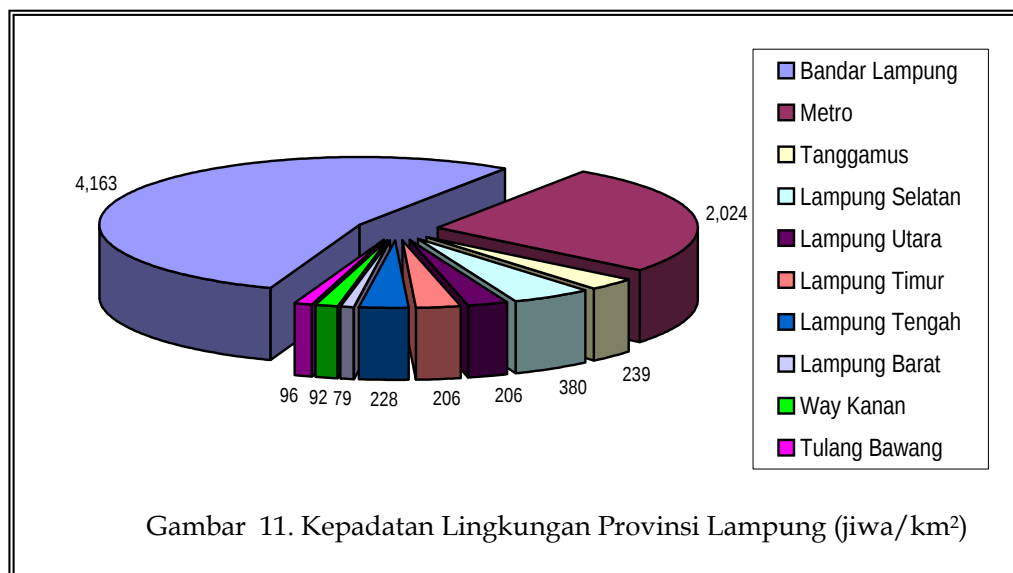
3.4.1. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung sangat pesat, terutama pada periode 1971-1980 tergolong tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan tinggi tersebut disebabkan antara lain karena migrasi penduduk yang memasuki Lampung, terutama dari Pulau Jawa. Antara tahun 1971 sampai dengan 1990 jumlah penduduk telah tumbuh lebih dari dua kali lipat. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2000 – 2005, jumlah penduduk Lampung tahun 2005 tercatat sebesar 6.983.699 orang. Dari total penduduk sebanyak 6.983.699 orang, 51,49 persen atau sebanyak 3.596.432 orang laki-laki, sedangkan selebihnya yaitu 3.387.267 orang perempuan. Berarti rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Lampung adalah sebesar 106,18(Tabel SDM-1) Persentase pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1971-1980 mencapai 5,77%, kemudian menurun menjadi 2,67% pada kurun waktu 1980-1990, kurun waktu 1990-2000 pertumbuhan tinggal 1,35% (Tabel SDM-2). Antara tahun 2000-2001 pertumbuhan penduduk menurun kembali dengan tajam yaitu hanya 0,91%. Secara ringkas, perkembangan penduduk disajikan pada Gambar 10.



Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, menyebabkan kepadatan penduduk di Provinsi Lampung juga cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2005, kepadatan penduduk absolut Provinsi Lampung telah mencapai 197,9 jiwa/km², dengan wilayah terpadat adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sedangkan kepadatan lingkungan (rasio jumlah penduduk dengan luas wilayah setelah dikurangi kawasan lindung) adalah mencapai 277 jiwa/km² (Tabel SDM-1).

Persebaran penduduk Provinsi Lampung relatif masih kurang merata. Berdasarkan kepadatan lingkungan, penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Kepadatan lingkungan di Tulang Bawang dan Way Kanan relatif masih rendah (sekitar 100 jiwa/km²). Kondisi kepadatan lingkungan menunjukkan bahwa peluang untuk melakukan aktivitas budidaya (pertanian) sudah relatif kecil, yang ditunjukkan oleh rasio kawasan budidaya hanya berkisar 0,9 sampai 40 jiwa/ha. Secara ringkas sebaran kepadatan lingkungan disajikan pada Gambar 11.



Adanya perbedaan sumberdaya antara satu wilayah dengan wilayah lain, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sebaran penduduk. Biasanya penduduk akan mengumpul pada suatu wilayah yang dapat menunjang kehidupannya.

Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan melalui penghentian sebagai penerima transmigrasi telah mampu menekan pertumbuhan penduduk secara signifikan. Data pada Tabel SDM-3 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 tidak terjadi imigrasi, bahkan sebaliknya terjadi emigrasi ke luar wilayah dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, keberhasilan program keluarga berencana (KB) turut memberikan andil besar dalam pengendalian jumlah penduduk. Kebijakan selanjutnya yang perlu ditempuh adalah pemerataan sebaran penduduk ke wilayah yang relatif masih kosong. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulang Bawang masih dapat memberikan ruang bagi pemerataan distribusi penduduk.

3.4.2. Angkatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Provinsi Lampung untuk tahun 2005 adalah sebanyak 59.719. Dimana sebagian besar pencari kerja berasal dari Kota Bandar Lampung dengan jumlah pencari kerja 26.290 orang atau sebesar 44,02 %. Dari jumlah total di Provinsi Lampung, sebagian besar pencari kerja memiliki tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebanyak 38.590 atau sebesar 64,62 %. Sedangkan pencari kerja dengan tingkat pendidikan sarjana S1 sebanyak 12.558 orang atau sebesar 21,03 % dari total keseluruhan pencari kerja. Namun, jumlah lowongan kerja yang tersedia di Provinsi Lampung tahun 2005 hanya sebesar 3.349 saja. Hal ini berarti lowongan pekerjaan yang ada saat ini masih kurang.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Lampung pada tahun 2006 sebesar Rp. 505.000,00 per bulan. Sedangkan besarnya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pekerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2006 rata-rata sebesar Rp. 589.540,00. Dengan demikian UMP Provinsi Lampung masih berada dibawah angka KMH pekerja.

Dari Tabel SDM-9 dapat dilihat bahwa penduduk perempuan usia kerja yang sekolah cukup besar, sehingga menuntut penyediaan lapangan kerja khusus untuk penduduk perempuan. Untuk mengatasi masalah sumberdaya manusia, kebijakan yang ditempuh dalam menanggulangi masalah sosial ekonomi dan kependudukan tersebut menjadi sangat kompleks karena keterkaitannya dengan berbagai sektor, tetap harus

dilanjutkan antara lain:

- a. Peningkatan anggaran pendidikan, dengan prioritas rehabilitasi lokal, penambahan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
- b. Penambahan tenaga guru dan distribusi guru yang cukup pada daerah terpencil dan pulau.
- c. Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja potensial, korban PHK dan mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan potensi SDA dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.
- d. Pemberantasan kemiskinan melalui *crash program* untuk menanggulangi masalah kemiskinan terutama di wilayah perkotaan.
- e. Penindakan secara tegas terhadap perambah hutan dan pencurian kayu.
- f. Mengarahkan program pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor pertanian rakyat dan industri kecil
- g. Pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman produktif dengan dukungan pemerintah.

3.4.3. Migrasi

Migrasi merupakan salah satu komponen perubahan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat/wilayah ke tempat lain yang melampaui batas administrasi suatu wilayah. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya yaitu faktor pendorong (*push factor*) dari daerah asal antara lain sempitnya lapangan kerja, kurangnya SDA, dan faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan antara lain tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mapan dan sebagainya.

Untuk sektor transmigrasi, di tahun 2005 terjadi sedikit peningkatan jumlah transmigran yang masuk ke Provinsi Lampung, yaitu meningkat dari 200 kepala keluarga (850 jiwa) di tahun 2004 menjadi 230 kepala keluarga (873 jiwa) di tahun 2005.

3.4.4. Struktur Umur Penduduk

Rasio jenis kelamin pada struktur penduduk Provinsi Lampung tahun 2005 sebesar 106,17. Rasio tersebut memberikan arti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Distribusi penduduk penduduk menurut kelompok umur seperti terbesar pada usia 0-14 tahun 2.088.621 jiwa atau 26,9 % dan umur 20-39 tahun 1.932.811 jiwa atau 27,67%.

Komposisi penduduk tersebut berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja pada sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam perekonomian Lampung yang sudah tentu harus ditunjang dengan peningkatan keterampilan dan keahlian.

Struktur umur penduduk laki-laki tahun 2005 tertinggi pada usia 0-14 tahun sebesar 1.078.503 jiwa atau 29,98 % dan diikuti oleh pemuda (20-39 Tahun) sebesar 1.229.263 jiwa atau 34,18 % dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Struktur umur penduduk perempuan tahun 2005 terbesar pada usia anak 0-14 tahun yaitu 1.010.118 jiwa atau 29,82% dan yang tertinggi penduduk usia pemuda 20-39 tahun yaitu 1.210.421 jiwa atau 35,73% dari jumlah penduduk perempuan.

Dari uraian tersebut penduduk Provinsi Lampung tahun 2005 dinyatakan sebagai penduduk muda. Apabila dikaji dari struktur umur penduduk, ternyata kelompok usia muda yaitu 15-39 tahun paling besar jumlahnya. Terhadap kelompok usia ini Pemerintah Provinsi Lampung sangat memberikan perhatian penuh, melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Daerah, atau program padat karya bagi yang tidak bersekolah, mengingat secara psikologis usia mereka sangat sensitif, agresif dan dinamis. apabila mereka tidak tertampung di sekolah atau tidak bekerja, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial.

3.4.5. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting bagi suatu bangsa karena pendidikan memiliki andil yang besar terhadap kemajuan bangsa, baik secara ekonomi maupun sosial. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia karena pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Investasi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia keuntungannya tidak hanya dinikmati oleh orang yang meningkatkan pendidikan tersebut (*private rate to return*) melainkan juga dinikmati oleh masyarakat luas (*social rate to return*).

Pendidikan yang memadai sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah menunjukkan tingginya kemampuan sumberdaya manusia. Berkembangnya industri disuatu wilayah menuntut pergeseran kemakmuran dari sifatnya tradisional pertanian menjadi keterampilan industri. Hal ini memerlukan keterampilan sumberdaya manusia yang lebih terdidik dan terampil.

Dalam pengembangan keterampilan penduduk, maka indikator status pendidikan memberikan gambaran yang penting. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia harus diikuti dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, mutu pendidikan, dan tenaga guru yang memadai.

Data pada Tabel SDM-3 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Lampung yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan tersebut menggambarkan bahwa penduduk Provinsi Lampung didominasi oleh penduduk yang tidak tamat SD dan hanya tamat SD. Sedangkan tingkat pendidikan tinggi hanya berjumlah dibawah 2% dari total penduduk.

Melihat rata-rata pendidikan tersebut, maka rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk memberikan gambaran kualitas SDM di Provinsi Lampung yang cenderung harus dipacu untuk terus ditingkatkan. Peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah di masa mendatang.

Kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah yang akan menyebabkan sulitnya

adaptasi terhadap perubahan aspek kehidupan terutama yang berhubungan dengan perekonomian. Sebaliknya sumberdaya manusia yang diperlukan dalam memasuki abad baru dan era milenium ketiga ini adalah manusia yang berkualitas, baik dari segi intelektualitas dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan usaha serius dalam pengembangan pendidikan, baik ilmu pengetahuan maupun keimanan, peningkatan kesehatan, dan dukungan faktor-faktor sosial lainnya.

Usaha pengembangan pendidikan tinggi (akademi/S1) terus dilakukan tetapi masalah dalam meningkatkan kualitas dan output pendidikan S1 dan tingginya tingkat pengangguran sarjana. Tingkat pengangguran tinggi akibat rendahnya keterampilan tenaga kerja dan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi.

3.4.6. Kesejahteraan Masyarakat

Indikator utama yang dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang terdiri atas 3 variabel yaitu indeks kelangsungan hidup, indeks pengetahuan dan indeks daya beli. Angka IPM Provinsi Lampung pada tahun 2002 sebesar 65,8 berarti status pembangunan manusia di Provinsi Lampung dalam kategori menengah ke bawah. Salah satu variabel yang menyebabkan kategori menengah ke bawah dari data IPM tersebut adalah masih rendahnya daya beli di Provinsi Lampung sebesar 51,60 yang merupakan efek dari krisis moneter lalu yang berkepanjangan dan kenaikan harga-harga barang (inflasi) antara periode tahun 1999-2000.

Indeks kelangsungan hidup dan indeks pengetahuan pada tahun 2002 cukup tinggi, yaitu 68,50 dan 77,30 yang berarti bahwa tingkat kesehatan di Provinsi Lampung sudah cukup berhasil untuk penduduk mencapai "usia hidup" yang panjang dan sehat dan begitu pula untuk mendapatkan pengetahuan yang merupakan bagian dari variabel angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Data BPS tahun 2003 memperlihatkan bahwa pada tahun 2003 nilai IPM Provinsi Lampung mencapai 66,00. Nilai ini diperoleh dari variabel indeks kelangsungan hidup 68,70; indeks pengetahuan 77,10; dan indeks daya beli 52,30 (BPS, 2003). Hal ini berarti bahwa pada tahun 2003

Provinsi Lampung mulai memasuki kategori menengah atas. Gambaran IPM di Provinsi Lampung terlihat pada Tabel 3.3.

Berdasarkan angka IPM, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung tahun masih rendah, yang dinyatakan dengan status “menengah ke bawah”. Kesejahteraan yang tertinggi hanya terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung yang memiliki status “menengah ke atas”. Bila dicermati, terlihat bahwa faktor penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat lebih disebabkan oleh indeks daya beli yang rendah.

Tabel 3-3. Indeks Komponen IPM per Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2003

No	Kabupaten/ Kota	Indeks Kelangsungan Hidup	Indeks Pengetahuan	Indeks Daya Beli	IPM*)
1	Lampung Barat	64,80	76,40	48,20	63,20
2	Tanggamus	68,50	76,10	52,00	65,50
3	Lampung Selatan	67,00	75,50	51,30	64,60
4	Lampung Timur	71,80	73,70	51,50	65,70
5	Lampung Tengah	70,50	77,40	52,70	66,90
6	Lampung Utara	67,30	80,60	50,90	66,30
7	Way Kanan	68,8	79,60	44,90	64,50
8	Tulang Bawang	66,50	72,10	52,00	63,50
9	Bandarlampung	71,50	83,10	57,60	70,70
10	Metro	78,00	86,20	56,40	73,50
	Provinsi Lampung	68,70	77,10	52,30	66,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2003)

Rendahnya tingkat daya beli masyarakat, diduga akibat dari krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan yang juga melanda Provinsi Lampung. Akibat krisis tersebut, terjadi peningkatan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), dan stagnasinya pertumbuhan investasi yang seharusnya dapat menampung angkatan kerja baru. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditempuh dengan melakukan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam jangka pendek, program pembangunan padat karya merupakan kebijakan yang harus ditempuh. Dan dalam jangka panjang pengembangan sektor perekonomian yang bersifat padat karya seperti pertanian dan agroindustri harus diberikan prioritas yang lebih tinggi.

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi keterkaitan antara kebijaksanaan implementasi kegiatan dan fakta lingkungan hidup hingga tahun 2006 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Strategi mitigasi bencana banjir dilakukan melalui upaya mitigasi non struktural, struktural serta peningkatan peran serta masyarakat.

a. Upaya Mitigasi Nonstruktural

- Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang beranggotakan dinas instansi terkait di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari Satlak PB untuk melaksanakan dan menetapkan pembagian peran dan kerja atas upaya-upaya non fisik penanganan mitigasi bencana banjir.
- Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
- Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir daerah yang rawan banjir.
- Menyiapkan peta daerah rawan bencana banjir.
- Mengecek dan menguji sarana sistem peringatan dini yang ada dan

- Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan material yang diperlukan untuk kegiatan/upaya tanggap darurat.
- Melaksanakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat, Satlak dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapannya.

b. Upaya Mitigasi Struktural

- Pengerukan sungai, pembuatan sodetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir. Untuk pembuatan sodetan guna mengurangi kemungkinan bencana banjir telah direncanakan di aliran Way Abung yang melintasi Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.

c. Peran serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- Aspek penyebab, jika beberapa peraturan yang sangat berpengaruh atas faktor-faktor penyebab banjir dilaksanakan atau dipatuhi secara signifikan akan mengurangi besaran dampak bencana banjir.
- Aspek partisipatif, dalam hal ini partisipasi atau kontribusi dari masyarakat dapat mengurangi dampak bencana banjir yang akan diderita oleh masyarakat sendiri,

Strategi mitigasi dan upaya pengurangan Bencana Longsor dilakukan dengan cara :

- Identifikasi, pengenalan dan pemetaan daerah rawan longsor, serta memasukan resiko bencana dalam penataan ruang dan kawasan

- Stabilisasi lereng dengan mengurangi tingkat keterjalannya lereng, meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah pembuatan terase dan penghijauan, serta penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat.
2. Wilayah Provinsi Lampung pada umumnya dan Bandarlampung khususnya merupakan daerah rawan gempabumi, sehingga daerah ini berpotensi untuk terjadinya gempabumi, baik yang bersumber di darat maupun di laut. Perlu lebih ditingkatkan kegiatan sosialisasi tentang bencana gempabumi oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat di daerah rawan gempabumi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan tentang bencana gempabumi.
 3. Provinsi Lampung masih terjangkit Avian Influenza (AI) tapi dapat terkendali, namun demikian wabah pada hewan dapat kembali muncul apabila langkah-langkah yang dilaksanakan kurang berhasil dan adanya peningkatan serangan / ganasnya virus. Keberadaan dan efektifitas tenaga penyuluh lapangan sangat diperlukan. Reaksi / gerak cepat dan tepat dari Tim Operasional di tingkat Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk keberhasilan penanggulangan kasus yang muncul.
 4. Kebijakan dasar untuk mengendalikan pencemaran udara, air, tanah, serta pesisir dan laut dikelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu perlindungan mutu ambien dan pengendalian kegiatan penyebab pencemaran. Perlindungan mutu ambien dilakukan dengan menetapkan standar ambang batas baku mutu yang dijadikan patokan pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan penegakan hukum, perubahan kebijakan, penyesuaian kegiatan pembangunan, bahkan sampai dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat agar tidak melampauinya. Sementara itu, pengendalian kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan cara penataan dan penegakan hukum serta penyediaan teknologi alternatif. Untuk mengurangi distorsi pasar, dikendalikan melalui kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi serta pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi kekuatan penekan yang strategis.

REKOMENDASI

5. Kebijakan penanggulangan bencana alam maupun lingkungan hidup bertumpu pada tiga hal, yaitu: (1) kemampuan mitigasi dan deteksi dini; (2) keberhasilan pencegahan bencana melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan perlindungan SDA; serta (3) kemampuan melakukan rehabilitasi pascabencana.
6. Areal RTH di Provinsi Lampung meliputi perbukitan, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, dan jalur hijau pantai. Untuk RTH perbukitan dan jalur hijau sungai tidak memerlukan persyaratan yang spesifik, sebagai tempat koleksi spesies yang bernilai konservasi, semua spesies sesuai untuk ditanam. Akan tetapi, untuk Hutan Kota, jalur hijau jalan dan jalur hijau pantai, karena berlokasi di perkotaan maka diperlukan syarat khusus untuk pohon perkotaan (*urban trees*).

Dari uraian evaluasi keterkaitan dan implementasi program serta kualitas lingkungan hidup saat ini, terlihat kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung secara umum masih perlu untuk di tingkatkan melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu di susun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau aksi pembangunan yang berlandaskan pada program prioritas lima tahun pengelolaan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan arah kebijaksanaan dan strategi masing-masing program.

Untuk mewujudkan keserasian antara kegiatan pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan, berdasarkan evaluasi dan kesimpulan pada bagian terdahulu tergambar bahwa terjadi degradasi kualitas lingkungan sebagai akibat dari kebijaksanaan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk dapat meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu disusun program-program yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

REKOMENDASI

1. Perlu dibuat peta zona kerawanan gempa bumi dengan skala rinci khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung pada umumnya sebagai data dasar dalam menyusun Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bangunan strategis, vital, pemukiman dan mengundang banyak konsentrasi orang agar dibangun dengan konstruksi tahan gempa bumi. Hindari membangun pada tanah timbunan dan lereng yang terjal, serta di sepanjang zona sesar aktif yang berfungsi sebagai sumber gempa bumi di darat, meskipun magnitudonya tidak terlalu besar.
2. Program pemulihan kualitas lingkungan, untuk mengevaluasi kegiatan dan penurunan beban lingkungan serta meningkatkan daya dukung lingkungan. Dan perlunya memperbaiki, menjaga dan mengembangkan fungsi konservasi kawasan bukit, pesisir/pantai, perairan laut dan pulau.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam program pengelolaan sampah/limbah domestik, sebagai upaya menciptakan terwujudnya kota-kota yang bersih, indah dan aman. Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru sudah saatnya dikembangkan. Biogas memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi dengan murah dan tidak mencemari lingkungan.
4. Teknologi produksi biogas dari air limbah industri tapioka merupakan alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing industri tapioka melalui penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Konsep ini perlu segera diwujudkan mengingat cadangan bahan bakar minyak semakin menipis dan pemanasan global sudah menjadi isu semua negara. Teknologi ini juga dapat diterapkan untuk pengolahan air limbah dari agroindustri lain seperti industri kelapa sawit, ethanol, pengalengan nenas, dan peternakan sapi. Dengan menerapkan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dunia usaha yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dan daya saing Provinsi Lampung.
5. Pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL, dilakukan melalui pengendalian pembangunan diantaranya industri, rumah sakit, rumah makan, dan hotel yang

REKOMENDASI

diarahkan pada pengembangan industri bersih, yaitu industri yang hemat lahan dan air, non polusi serta menyerap banyak tenaga kerja serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

6. Melakukan pendidikan lingkungan terhadap masyarakat secara terus menerus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuannya sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini dapat dimulai dari anak-anak usia TK, SD, SMP, dan SMA.
7. Mengembangkan penerapan konsep produksi bersih dan nir limbah (*cleaner production dan zero emission*) di berbagai industri.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung. 2006. *Bandar Lampung Dalam Angka 2005*. Bandar Lampung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2006. *Statistik Kehutanan dalam Angka Provinsi Lampung 2005*. Bandar Lampung.
- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. 2004. *Buku Informasi Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 2004*. Bandar Lampung.
- Pemda Provinsi Lampung dan CRMP. 1999. *ATLAS Sumber Daya Wilayah Pesisir Lampung*. Bandar Lampung.